

BAB III

**GAMBARAN
PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA
KERANGKA PENDANAAN****A. Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau****1. Pendapatan Provinsi Riau 2004-2008**

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah dapat terus dilakukan, baik melalui Intensifikasi maupun ekstensifikasi secara selektif, sehingga diharapkan tidak menghambat akselerasi perkembangan aktifitas pembangunan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan yang semakin berkembang di dalam masyarakat.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pendapatan mengalami pertumbuhan rata-rata 17,76%. Pertumbuhan tersebut di topang antara lain oleh pertumbuhan rata-rata PAD sebesar 15,05% dan pertumbuhan rata-rata Pajak Daerah sebesar 12,16%, disamping pertumbuhan retribusi daerah, usaha daerah, dan pendapatan lainnya.

Jumlah pendapatan dari Perimbangan Keuangan Daerah, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 telah bertumbuh sebesar 23,68%. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan bagi hasil bukan pajak sebesar 22,92%, dan pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 33,64%. Kedepan pertumbuhan DAU mempunyai kecenderungan menurun, karena formula penetapan DAU tidak mengakomodir kepentingan pembangunan Provinsi Riau.

2. Belanja Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2004-2008

Pada sisi Belanja, peningkatan selama 5 tahun terakhir sebesar 19,08%. Peningkatan tersebut diikuti oleh peningkatan Belanja Langsung sebesar 25,71%. Kebijakan anggaran yang di anut yaitu, porsi anggaran belanja langsung harus

lebih besar dari belanja tidak langsung. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja, terjadi kecenderungan defisit, dimana persentase defisit dengan PDRB harga berlaku tahun 2004 sebesar 0,57%, tahun 2005 sebesar 0,65%, tahun 2006 sebesar 0,53%, tahun 2007 tidak terjadi defisit, serta tahun 2008 kembali terjadi defisit anggaran sebesar 0,63%. Sedangkan rata-rata porsi dana perimbangan untuk belanja daerah adalah 54,46%. Penerimaan pembiayaan daerah harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Di samping itu perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.1

Jumlah Pendapatan dan Belanja Provinsi Riau (Miliar Rp)
Tahun 2004 - 2008

URAIAN	2004	2005	2006	2007	2008	(%)
A. PENDAPATAN	1,636.06	2,223.88	3,062.80	3,546.76	3,463.07	17.76
1. Pendapatan Asli Daerah	621.89	722.83	913.26	1,104.01	1,089.58	15.05
- Pajak Daerah	537.76	603.03	755.15	849.15	849.15	12.10
- Restribusi Daerah	4.63	38.11	31.07	34.45	36.71	67.80
- Laba Bumd/Usaha Daerah	36.89	25.19	45.98	108.83	109.17	31.16
- Pendapatan Lainnya	42.61	56.50	81.06	111.58	94.55	21.98
2. Perimbangan Keuangan Daerah	1,014.17	1,501.05	2,149.54	2,442.75	2,373.49	23.68
- Bagi Hasil Bukan Pajak	952.55	1,408.90	2,057.39	2,165.10	2,175.12	22.92
- Dana Alokasi Umum (DAU)	61.62	92.15	92.15	277.65	198.37	33.64
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	-	-	-	-	-
3. Pendapatan Lainnya	164.80	118.45	111.15	20.00	-	19.08
B BELANJA	2,167.85	2,859.56	3,669.81	4,386.25	4,358.50	-
- Tidak Langsung	1,040.91	1,488.51	1,811.47	1,372.64	1,544.22	25.71
- Langsung	1,126.94	1,371.05	1,858.34	3,013.61	2,814.28	-
C DEFISIT	366.99	517.21	495.86	-	895.43	-
1. Persentase Defisit Dengan PDRB	0,57	0,65	0,53	-	0,63	-

Sumber : APBD Provinsi Riau Tahun 2004 – 2008

Sementara itu, berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah yang bersumber dari dana APBD Provinsi 2004-2008 mencakup sejumlah dana antara lain: (1) Dana Sisa Lebih (Silpa), (2) Pinjaman Daerah serta (3) Investasi terhadap penyertaan modal pada BUMD. Dana Silpa pada kurun waktu tersebut di atas sebanyak Rp. 3.519.188.519.443,- diprioritaskan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung (gaji), sedangkan Pinjaman Daerah selama kurun waktu tersebut tidak ada, atau nihil.

Selanjutnya untuk Penyertaan Modal, yaitu penyertaan modal untuk BUMD dan penyertaan modal dalam rangka mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat, sebesar Rp 434.303.345.897, dengan rincian untuk penyertaan modal BUMD mencakup Bank Riau, PT. PIR, PER, PT. RAL, sebesar Rp 343.303.345.897,- sedangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pemerintah telah memprogramkan sistem pinjaman tanpa agunan yang disalurkan melalui program UED-SP sebesar Rp 500.000.000 per desa sebanyak 182 desa dengan nilai total sebesar Rp 91.000.000.000,- . Untuk lebih jelasnya perkembangan penerimaan dan pengeluaran dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3.2
Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Riau
Tahun 2004-2008

No.	Jenis Pengeluaran/ Penerimaan	Tahun					Jumlah
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SILPA	497,409,053,942.30	614,741,025,483.24	831,884,359,910.06	1,113,569,407,487.38	461,584,672,620.24	3,519,188,519,443.22
2	Penyertaan Modal	30,314,000,000	27,894,545,897	79,182,000,000	230,612,800,000	66,300,000,000	434,303,345,897
	A. BUMD (PT. Bank Riau, PT. PIR, PT. RAL)	30,314,000,000	16,894,545,897	63,182,000,000	194,112,800,000	38,800,000,000	343,303,345,897
	B. Dukungan Perekonomian Masyarakat (Bantuan UED-SP)	-	11,000,000,000	16,000,000,000	36,500,000,000	27,500,000,000	91,000,000,000

Sumber : Bappeda Provinsi Riau Tahun 2009

B. Kerangka Pendanaan Provinsi Riau

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk kebutuhan masyarakat.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan paradigma pengelolaan Otonomi Daerah tidak terpisahkan terhadap perubahan pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini menjadikan pengelolaan keuangan daerah dapat dijalankan secara tertib, transparan, akuntabilitas, konsistensi, komprabilitas, akurat, efisien dan efektif. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka secara umum arah kebijakan keuangan Provinsi Riau selama ini adalah sebagai berikut:

- (1) Mengintensifkan sumber-sumber pendapatan asli daerah baik pajak daerah, retribusi daerah, maupun pendapatan-pendapatan daerah lainnya yaitu dengan menangani dan memperbaharui tarif, kegiatan operasional dan memperbaiki sistem pemungutan sepanjang tidak menghambat kelancaran kegiatan pembangunan;
- (2) Meningkatkan mutu dan kemampuan teknis pelaksanaan, melalui penataran, kursus-kursus di bidang keuangan daerah serta penyempurnaan fasilitas dan sarana penunjang lainnya;
- (3) Mengadakan penelitian terhadap sumber-sumber potensi alam yang ada di daerah sebagai usaha untuk penggalian sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan dapat mendatangkan peningkatan pendapatan daerah;
- (4) Mengarahkan penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan daerah untuk anggaran langsung maupun anggaran tidak langsung secara berhasil guna dan berdayaguna serta menghindari penggunaan dana yang kurang tepat/kurang berdayaguna;

-
- (5) Mengintensifkan pemungutan dana dengan memberikan sanksi bagi yang melakukan kecurangan dalam pemungutan dan pembayaran pajak.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2006 berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Untuk tahun 2007 penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan APBD Provinsi Riau tahun 2008 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu.

Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diperlukan sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah, selama 5 (lima) tahun terakhir difokuskan untuk pendanaan program antara lain:

1) Kemapanan Ekonomi Masyarakat

Upaya pengentasan kemiskinan yang bersifat komprehensif dan mendasar guna meningkatkan kesejahteraan dan harkat masyarakat Riau melalui instrumen kebijakan ekonomi makro dan mikro. Upaya pengentasan kemiskinan tersebut ditujukan untuk menurunkan bagian penduduk Riau yang tergolong miskin, dimana pada periode 2004 – 2007 berhasil menurun dari 14,67% menjadi 11,20% atau rata-rata sebesar 0,87% per tahun lebih tinggi dibandingkan rata-rata Nasional sebesar 0,5% per tahun.

2) Penanggulangan Ketertinggalan Sumberdaya Manusia

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Riau mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Indikasi ini dapat diperhatikan tahun 2004, dimana jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang

tamat atau tidak tamat SD/MI adalah 53,23%. Sedangkan tahun 2007 dapat diturunkan menjadi 43,57%. Oleh karena itu, program yang relevan perlu dilanjutkan dengan dukungan sistem dan perangkat pendidikan yang berkualitas, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan merata, adil, dan terjangkau.

3) Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Penunjang

Pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi, kelistrikan, telekomunikasi, dan utilitas permukiman menjadi salah satu program prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahap kedua. Pembangunan ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai program berkelanjutan dari pembangunan periode sebelumnya. Infrastruktur dan sarana penunjang lainnya yang membutuhkan peningkatan dan perbaikan antara lain: (1) Pada tahun 2004 - 2007 panjang jalan provinsi meningkat dari 2.162 Km menjadi 3.033 Km, (2) kondisi jalan provinsi berkualitas baik meningkat dari 598 Km menjadi 734 Km, (3) kapasitas listrik terpasang meningkat dari 266,57 MW menjadi 290,19 MW, dan (4) rasio elektrifikasi meningkat dari 34,2% menjadi 41,2%. Demikian pula (5) pembangunan jembatan, (6) pelabuhan laut dan sungai, (7) prasarana telekomunikasi, dan (8) peningkatan penyediaan air bersih, serta (9) peningkatan jumlah rumah layak huni.

4) Program Pembangunan Lainnya

Pembangunan sektor lainnya disesuaikan dengan bidang urusan wajib dan pilihan Pemerintah Provinsi Riau.

Tabel 3.3

Penempatan Kerangka Pendanaan Menurut Urusan Wajib dan Pilihan
SKPD Pemerintahan Provinsi Riau
Tahun 2004-2008

No	URUSAN PEMERINTAH
	URUSAN WAJIB
1	Pendidikan
2	Kesehatan
3	Pekerjaan Umum
4	Perencanaan Pembangunan
5	Perhubungan
6	Lingkungan Hidup
7	Pemberdayaan Perempuan
8	Sosial
9	Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
10	Koperasi dan UKM
11	Penanaman Modal
12	Kebudayaan dan Pariwisata
13	Kepemudaan dan Olah Raga
14	Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri
15	Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
16	Ketahanan Pangan
17	Pemberdayaan Masyarakat
18	Komunikasi, Informasi dan PDE
	URUSAN PILIHAN
1	Pertanian
2	Kehutanan
3	Pertambangan dan Energi
4	Perikanan dan Kelautan
5	Perindustrian dan Perdagangan

BAB IV

Isu strategis pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan rumusan terhadap persoalan-persoalan dasar yang bersifat penting, strategis dan perlu diberikan perhatian khusus dalam pembangunan. Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2009-2013 isu-isu strategis yang teridentifikasi meliputi analisis tentang lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta analisis eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan yang akan dihadapi selama pembangunan jangka menengah.

A. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah mengidentifikasi tentang kondisi dan situasi Provinsi Riau yang berupa *kekuatan* dan *kelemahan*. *Kekuatan* adalah melakukan analisis terhadap keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif di Provinsi Riau dibandingkan dengan daerah lainnya sehingga dapat dijadikan modal utama dan faktor penting untuk memacu jalannya pembangunan guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan *kelemahan* adalah melakukan analisis dan mengidentifikasi faktor yang akan mengurangi ataupun melemahkan kemampuan daerah dalam mencapai visi dan menjalankan misi pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga untuk itu perlu upaya untuk memberikan perhatian yang lebih guna mengatasi kelemahan tersebut.

1. Kekuatan

a. Letak wilayah strategis

Provinsi Riau memiliki yang letaknya memanjang di Timur Sumatera, sehingga menjadi lintasan antara wilayah yang berada di Sumatera Bagian Selatan dengan Sumatera Bagian Utara. Sebagai wilayah yang letaknya juga berada di pantai Timur Sumatera, Provinsi Riau berada dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia dan

Singapura. Dengan kedua hal tersebut, telah menjadikan posisi letak wilayah Provinsi Riau menjadi sangat strategis dan apabila dikelola dengan baik akan mampu menciptakan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan dan dijadikan modal dasar yang besar nilainya bagi pembangunan.

b. Potensi Sumber Daya Alam

Provinsi Riau memiliki wilayah daratan yang cukup luas dengan kondisi topografi yang relatif datar dan jenis tanah podsolik merah kuning (PMK) serta sebagian lahannya merupakan lahan organis berbentuk bergambut, sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian tanaman keras. Disamping itu pada beberapa kawasan tertentu yang sangat letaknya strategis dan kondisi lahan potensial dapat dikembangkan sebagai kawasan industri, pemukiman, pelabuhan dan lain-lain. Kawasan-kawasan andalan yang telah terbentuk seperti Pekanbaru dan sekitarnya (Bangkinang dan Pasir Pangaraian) untuk sektor unggulan tanaman pangan, industri, perkebunan, dan pertambangan. Kawasan Dumai dan sekitarnya (Duri, Bagan Siapi-api, Bengkalis) untuk sektor industri, perkebunan, pertambangan dan perikanan. Kawasan Rengat – Kuala Enok (Tembilahan, Sungai Akar, Air Molek, Taluk Kuantan) untuk sektor pertambangan, tanaman pangan, perkebunan, dan pariwisata. Khusus untuk wilayah Dumai, Pekanbaru, Kuala Enok, Buton dan Bengkalis telah dikembangkan kawasan pelabuhan.

Sesuai dengan kondisi geografisnya, maka di Provinsi Riau terhadap sejumlah deposit sumberdaya mineral yang sangat besar dan potensial yang telah dan dapat dikembangkan pada masa mendatang, seperti minyak dan gas bumi, kaolin, bouksit, timah, batubara, emas, pasir bangunan, dan sumberdaya mineral lainnya yang tersebar pada beberapa Kabupaten/kota.

Dari sisi potensi sumberdaya wisata, terdapat sejumlah potensi yang tersimpan dan masih perlu pengembangan lebih lanjut dengan memberikan sentuhan manajemen pengelolaan yang lebih profesional lagi. Bentuk potensi yang ada tersebut adalah berupa sumberdaya alam yang ada di pesisir maupun di lautan, potensi wisata alam (hutan, flora, fauna, pantai, laut dan lain-lain), potensi wisata sejarah, wisata budaya, wisata belanja, dan potensi wisata lainnya.

Sesuai dengan letak wilayah yang strategis dan besarnya potensi sumberdaya alam yang terkandung di Bumi Provinsi Riau, sehingga memberikan peluang investasi yang cukup besar dan telah memberikan

implikasi yang positif berupa laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Walaupun krisis ekonomi dunia melanda dalam bentuk krisis finansial global masih terjadi, laju pertumbuhan ekonomi masih berada di atas rata-rata LPE nasional pada tahun 2008 yakni sekitar 8,06%. Hal ini menggambarkan basis perekonomian Provinsi Riau relatif kokoh karena tidak lepas dari peran 3 (tiga) sektor kunci yang cukup strategis, yakni sektor pertanian, industri, dan perdagangan.

c. Kapasitas Pemerintahan Yang Semakin Baik

Desentralisasi pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata bertanggungjawab sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 kemudian diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Sejalan dengan sifat hubungan pemerintahan yang mengalami perubahan paradigma tersebut, maka diperlukan pendekatan baru yang lebih sesuai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan situasi dan tuntutan daerah yang bersangkutan. Kebijakan ini telah memberikan peluang dan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan aspirasi, inspirasi dan motivasi yang lebih kuat lagi untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam membangun dan mengembangkan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh seluruh komponen.

d. Berkembangnya Lembaga Pembiayaan Keuangan

Kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha kecil-mikro, menengah dan koperasi (UKMK), telah ikut memperkuat tatanan dan struktur perekonomian daerah yang ditandainya semakin tumbuh dan berkembangnya UKMK baru yang didukung oleh kehadiran berbagai lembaga pendukung di bidang permodalan, seperti PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER) dan PT. Sarana Penjamin Riau (PT. SPR), serta tumbuh dan berkembangnya sejumlah lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan mikro dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Baitul Mal Tanwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan sebagainya yang menyediakan fasilitas pembiayaan dengan persyaratan yang relatif lunak dari pada bank konvensional.

e. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah

Dalam rangka mengakselerasikan pencapaian tujuan pembangunan melalui perluasan peran pemerintah secara tidak langsung dalam penyelenggaraan pembangunan, maka sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada telah diperkuat kapasitasnya dan telah menunjukkan kondisi yang semakin kompetitif, yakni PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR), PT Riau Air Line (PT. RAL), dan PT. Bank Riau. Sementara berbagai kelembagaan yang berorientasi pada penguatan perekonomian daerah juga telah dikembangkan oleh masyarakat daerah Riau, seperti kehadiran PT. Riaupos Group, PT. Riau Mandiri Group, PT. Riau Investment Corporation (PT. RIC), PT. Riau Power, dan gerakan untuk menghimpun dana investasi masyarakat melalui "GENTA MELAYU" dan *Riau Fund*.

f. Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan yang Kondusif

Pemilihan Umum Legislatif yang berjalan dengan aman, tertib, jujur dan adil, telah dapat menghasilkan para calon anggota legislatif yang memiliki kepercayaan yang tinggi melalui pemilihan langsung dan sistem suara terbanyak. Hal ini akan semakin memperkuat lembaga DPRD Provinsi Riau sebagai lembaga legislatif yang akan menjalankan fungsi pengawasan politik yang lebih baik lagi. Kondisi tersebut juga didukung oleh dan suasana kehidupan politik yang semakin demokratis dan transparan sehingga keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol semakin tinggi, yang menuntut adanya pola dan pendekatan baru dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sesuai dengan tuntutan reformasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan bersih, maka partisipasi masyarakat akan menempati posisi yang strategis di dalam pembangunan.

Kapasitas Pemerintahan Provinsi Riau yang semakin baik, dilihat dari sisi infrastruktur maupun suprastruktur sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, akan semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini akan dapat dirasakan bukan hanya oleh masyarakat yang berada dalam wilayah Provinsi Riau saja, tetapi juga masyarakat dalam negeri lainnya maupun luar negeri yang membutuhkan pelayanan prima dari pemerintah untuk keperluan investasi di Provinsi Riau.

g. Budaya Melayu sebagai Kekayaan Daerah

Sebagai daerah yang terbuka, maka adanya keragaman etnik dan suku yang telah menyatu, sehingga bagi masyarakat yang bertempat tinggal, hidup, berkembang dan berusaha di Provinsi Riau telah menjadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jiwanya. Hal ini merupakan suatu modal sosial yang akan ikut memacu pembangunan Provinsi Riau guna mencapai visi yang sudah ditetapkan.

2. Kelemahan

a. Ketergantungan pada Kebijakan Ekonomi Luar Negeri

Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang relatif masih cukup besar dan letaknya berbatasan langsung dengan salah satu selat terpadat di dunia dan negara yang telah lebih maju dan berkembang serta adanya fenomena perkembangan ekonomi yang mengarah pada globalisasi dan liberisasi perekonomian, telah memberikan konsekuensi logis terhadap perekonomian daerah Riau yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi dan sangat resisten terhadap perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi luar negeri.

Kondisi perekonomian luar negeri yang masih belum stabil oleh karena adanya berbagai bentuk krisis, terakhir ditandainya dengan adanya krisis keuangan global (*Global Finance Crisis*) memberikan ketidak-pastian terhadap stabilitas perekonomian daerah. Dampak yang paling dirasakan dan terkait dengan penganggaran keuangan daerah adalah apabila terjadi penurunan harga minyak bumi di pasar internasional. Kondisi tersebut akan berdampak pada penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber penerimaan APBD yang terbesar. Demikian juga harga minyak sawit (CPO) yang sering mengalami fluktuasi dan komoditi pertanian serta manufaktur yang diproduksi Riau dan dipasarkan pada pasar internasional.

b. Tanah rawa dan gambut

Kondisi wilayah daratan yang berawa-rawa dan berlahan gambut di sepanjang pantai timur yang dipengaruhi oleh pasang surut air. Kawasan

pasang surut seluas ± 3,9 juta hektar dan kawasan berlahan gambut seluas ± 4,8 juta hektar. Untuk mengelola potensi sumberdaya alam tersebut menghadapi permasalahan yang kompleks karena membutuhkan investasi yang cukup besar, teknologi yang tinggi, dan sistem manajemen modern oleh karena mengelola lahan gambut dibutuhkan sistem drainase dalam skala besar serta input pemupukan dan pengapuran tanah yang cukup intensif. Kesulitan lain yang dihadapi pada kawasan "lahan marginal" lainnya adalah untuk memperoleh sumber air baku dengan kualitas yang baik dan layak untuk penyediaan air bersih di sepanjang kawasan pantai timur.

Apabila perekonomian Provinsi Riau memasukkan sumberdaya minyak dan gas bumi, maka akan menunjukkan bahwa struktur perekonomian Provinsi Riau sangat di dominasi oleh sektor yang "*tidak dapat diperbarui*" ini. Hal ini menggambarkan tingkat kerentanan yang tinggi oleh karena adanya keterbatasan waktu dalam pengelolaan sumberdaya yang tidak bisa diperbarui, fluktuasi harga migas yang berpengaruh langsung terhadap kondisi perekonomian baik secara nasional maupun regional, terutama untuk penerimaan daerah, manajemen pengelolaan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat yang cenderung "*tidak transparan*" dalam melaporkan hasil "*lifting*"nya, sehingga berdampak pada penerimaan Dana Bagi Hasil.

Sebaran potensi sumberdaya alam dan kondisi lahan Provinsi Riau relatif tidak merata dan tidak sama, sehingga mengakibatkan terjadinya disparitas perkembangan ekonomi antara wilayah Riau yang juga tidak merata, dimana Riau bagian tengah dengan bagian utara dan bagian selatan, antara kawasan perkotaan dan perdesaan, antara kawasan pantai timur dengan wilayah bagian barat, yang antara lain disebabkan oleh adanya pemusatan usaha skala besar pada pusat-pusat kegiatan utama dan monopoli investasi beberapa perusahaan berskala besar. Pusat-pusat kegiatan belum mampu berfungsi sebagai penggerak perkembangan wilayah.

Pembangunan dan pertumbuhan sektor non-migas terutama yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam non migas belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap penguatan struktur perekonomian dan pembangunan Provinsi Riau yang berkelanjutan, walaupun potensi yang telah dikembangkan secara kuantitatif cukup luas untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan. Hal ini disebabkan oleh karena perkembangan tersebut tidak diikuti secara seimbang dengan kemajuan pembangunan di hilirnya.

c. Tumpang Tindih Lahan

Penguasaan lahan yang berlebihan baik oleh swasta maupun individu telah menimbulkan permasalahan yang tersendiri, terutama dalam hal pemanfaatan yang masih kurang sehingga disatu sisi cukup banyak lahan-lahan yang tidak produktif (lahan tidur), namun di lain sisi banyak pihak yang membutuhkan lahan-lahan baru untuk pengembangan pertanian dan masih cukup banyaknya petani yang memiliki lahan di bawah standar (kurang dari 2 hektar) untuk menyangga ekonomi rumah tangganya.

d. Distribusi Penduduk dan Pembangunan Tidak Merata

Distribusi penduduk yang belum merata serta terkonsentrasinya sebagai pemukiman mengikuti pola daerah aliran sungai (Sungai Siak, Kampar, Indragiri, dan Rokan), serta di wilayah daratan maupun kepulauan, terutama pada kawasan darat yang belum cukup tersedia sarana dan prasarana. Distribusi penduduk menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perkotaan pertumbuhannya meningkat dua kali lipat jika dibandingkan dengan penduduk di wilayah perdesaan. Gejala tersebut disebabkan oleh perubahan kawasan perdesaan menjadi perkotaan secara fisik dan fungsional, juga memberikan indikasi bahwa kebijakan pembangunan lebih berorientasi pada kawasan perkotaan. Selain itu pertumbuhan penduduk Provinsi Riau masih digolongkan tinggi di Indonesia sebesar 3,53% terutama pertumbuhan yang disebabkan oleh migrasi. Akibat distribusi penduduk yang tidak merata dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menimbulkan persoalan bagi distribusi angkatan kerja, pemerataan pembangunan, dan penyediaan prasarana ekonomi dan sosial.

Masih dihadapinya sejumlah masalah dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat terutama untuk masyarakat tempatan, yang disebabkan oleh karena rendahnya kualitas sumberdaya manusia sehingga rendahnya keterampilan, rendahnya etos kerja, kurang kuatnya budaya wirausaha, rendahnya kemampuan manajerial dan terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi pemasaran, permodalan dan bahan-bahan penunjang produksinya, serta teknologi yang tepat guna.

e. Tingginya Angka Kematian

Jumlah penduduk miskin yang belum turun secara signifikan, khususnya di daerah terpencil, belum optimalnya program-program penanggulangan

kemiskinan dan masih rendahnya peran lembaga swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau tahun 2005 sebesar 600.400 jiwa (12,51%) dan pada tahun 2007 sebesar 574.500 jiwa (11,20%), dan tahun 2008 sebesar 10,63%.

Wilayah Provinsi Riau yang cukup luas dengan kondisi topografi dan tekstur lahan yang sedemikian rupa, telah membawa efek terhadap pembangunan infrastruktur yang relatif lambat untuk mampu mengakses ke seluruh wilayah terutama yang potensial. Kondisi ini menyebabkan masih terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah kecamatan maupun antara desa dan kota, bahkan pada sejumlah wilayah telah menimbulkan kerawanan yang tinggi, baik terhadap rawan bencana, rawan pangan, dan rawan gizi buruk dan rawan terhadap kemiskinan serta kebodohan.

f. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Rendah

Sebagian besar kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Riau relatif masih rendah terutama pada sektor pertanian ataupun yang berada di pedesaan. Keterbatasan tersebut baik dari segi berkualitas maupun kuantitas, keragaman keahlian dan keterampilan. Hal ini tercermin dari masih terdapatnya penduduk yang butu huruf, Angka Partisipasi Pendidikan yang masih belum mencapai 100% untuk SMP dan SMA sederajat.

Dari sisi penyebarannya, sumberdaya manusia yang berkualitas pada umumnya menumpuk di perkotaan, terutama di Kota Pekanbaru, Dumai dan Ibukota Kabupaten, sedangkan di pinggiran Ibukota Kabupaten-kabupaten cenderung lebih rendah, apalagi di pedesaan daerah terpencil/sulit. Ini disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata baik secara kuantitas maupun kualitas yang telah dipersyaratkan untuk transportasi dan sarana penunjang ekonomi lainnya.

Kendati telah terjadi perubahan paradigma dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya, akan tetapi sebagian besar masyarakat masih relatif kurang memahami perubahan tersebut secara utuh dan kadang kala tidak disikapi secara arif. Idealnya kondisi tersebut menjadi input kebijakan untuk mendekatkan program-program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Konsekuensinya menyebabkan timbulnya berbagai persoalan yang dapat mengganggu proses percepatan pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati.

Sementara itu, upaya penegakkan hukum yang masih kurang konsisten, transparan, dan adil, telah ikut menciptakan suasana yang rawan terhadap

timbulnya berbagai bentuk keamanan dan ketertiban masyarakat, korupsi dan kolusi, penyelundupan, illegal logging, dan berbagai tindakan yang dapat menimbulkan instabilitas daerah.

g. Ketersediaan Infrastruktur yang Terbatas

Pengembangan kawasan industri dengan dukungan pelabuhan laut sebagai akses transportasi antara lain di Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok dan Bengkalis merupakan kawasan pelabuhan yang dijadikan pusat-pusat kegiatan strategis Provinsi Riau. Pengembangan kawasan industri tersebut membutuhkan dukungan system transportasi multi modal, prasarana sosial dan ekonomi lainnya.

h. Degradasi Lingkungan Hidup

Konflik pemanfaatan ruang sebagian besar dihadapi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau, terutama berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara liar. Pemanfaatan ruang darat dan laut berfungsi lindung oleh kegiatan budidaya memberikan dampak berupa kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Pada masa mendatang pemanfaatan ruang perlu diselaraskan dengan ketetapan yang diatur dalam RTRW Provinsi Riau, terutama dalam upaya mempertahankan, menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, baik suaka alam, kawasan bergambut dan berhuan mangrove, dan kawasan terumbu karang dan padang rumput.

Degradasi kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh meningkatnya eksploitasi hutan yang tidak terkendali serta tingginya pencemaran (air, udara, tanah). Permasalahan lingkungan sejak beberapa tahun terakhir berlangsung secara berkala adalah perubahan iklim yang tidak menentu dan cenderung meningkatkan suhu bumi. Hal tersebut juga disebabkan dari kebakaran hutan pada musim kemarau yang telah mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta kondisi kesehatan masyarakat. Semua ini diakibatkan rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara lingkungan yang lestari. Fenomena ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus sengketa lingkungan dan rendahnya pengawasan dan pengendalian rencana pemantauan lingkungan bagi kegiatan wajib AMDAL.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal adalah melakukan analisis terhadap *peluang* dan *tantangan* yang sedang ataupun akan dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Provinsi Riau yang berasal dari luar untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan. Analisis *peluang* adalah dalam bentuk mengidentifikasi terhadap faktor-faktor yang akan dapat memberikan ruang bagi daerah untuk dapat mendinamisasikan pembangunan. Sedangkan *tantangan* adalah merupakan upaya identifikasi terhadap hal-hal yang diperkirakan akan merintang atau mengganggu jalannya proses pembangunan dalam bentuk kebijakan dan program yang telah ditetapkan yang berasal dari lingkungan eksternal, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasinya.

1. Peluang

1. Lingkungan Strategis

Perkembangan politik nasional yang sangat dinamis, terutama tuntutan untuk mewujudkan kehidupan politik yang lebih demokrasi, transparan, akuntabel dan otonomisasi merupakan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan kondisi, potensi dan kapasitas yang ada secara lebih maksimal dan dinamis lagi berdasarkan karakteristik daerah, aspirasi masyarakat daerah, dan kemauan politik tanpa harus ikut sertanya intervensi dan campur tangan dari pemerintah yang lebih tinggi.

Letak dan posisi yang strategis merupakan salah satu daya dukung bagi perkembangan ekonomi, aspek sosial politik, dan sosial budaya yang relatif baik, aman, dan stabil juga di samping merupakan peluang bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengembangkan kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral yang bersifat sinergis untuk meningkatkan dan mempercepat proses penguatan ketahanan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi sumberdaya daerah dan pemberdayaan ekonomi rakyat (*empowerment of economic society*), serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia (*human resources development*).

2. Perkembangan Politik Nasional.

Stabilitas politik nasional berkembang secara dinamis dan positif, demikian juga pertumbuhan pada aspek ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban daerah yang dapat dipertahankan, telah menumbuhkan kepercayaan yang cukup kuat bagi kalangan investor baik yang ada di dalam maupun di luar

negeri, sehingga hal ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk tetap terus mendorong kegiatan investasi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perwujudan visi pembangunan daerah.

Terbukanya pasar domestik, regional, dan internasional bagi produk-produk pertanian dan perkebunan telah mendorong perkembangan sektor transportasi, sektor jasa dan sektor terkait lain.

3. Eratnya Hubungan Kerjasama Regional.

Kerjasama ekonomi regional dan perjanjian bilateral dan multilateral yang memberikan peran secara khusus bagi Provinsi Riau melalui IMT-GT, SOSEK MALINDO, Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), AFTA, dan APEC serta otonomi daerah memberikan peluang untuk mengembangkan perekonomian dengan lebih leluasa dalam pasar global. Demikian pula berbagai kebijakan nasional ikut mendukung pembangunan ekonomi secara terpadu dengan penempatan kebijakan wilayah nasional lainnya. Kebijakan tersebut antara lain pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri, perdagangan dan jasa. Penetapan Dumai sebagai pusat pengembangan *biofuel* dengan bahan baku kelapa sawit di sekitarnya serta kebijakan Tata Perencanaan Nasional (TATRANAS) yang menempatkan Provinsi Riau sebagai pusat lintasan regional, juga kerjasama ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kebijakan penataan ruang nasional dan menempatkan Kota Pekanbaru sebagai pusat kegiatan nasional, dan sebagainya.

Pengembangan kawasan industri dengan dukungan pelabuhan laut sebagai akses transportasi antara lain di Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan Bengkalis. Sebagai salah satu pembentuk pusat kegiatan, maka pengembangan kawasan industri membutuhkan dukungan system transportasi multi modal dan prasarana social dan ekonomi lainnya. Pelabuhan-plabuhan tersebut antara lain Pelabuhan Dumai dengan pelabuhan pengumpan Panipahan, Sinaboi, Tanjung Medang, Tanjung Lumba-lumba, dan Bagan Siapi-api. Pelabuhan Kuala Enok dengan pelabuhan pengumpan Perigi Raja, Sungai Guntung, Kuala Gaung, Pulau Kijang, Kuala Mandah, Rengat, Sapat, Tambilahan, dan Pulau Palas. Pelabuhan Mengkapan Buton dengan pelabuhan pengumpan Bengkalis, Bandul, Tanjung Samak, Sei. Pakning, Siak Kecil, Perawang dan Tanjung Kedabu serta Pelabuhan Pekanbaru. Akses jalan juga diperlukan dengan tujuan bertujuan untuk memobilisasi barang khususnya barang hasil perkebunan guna pengapalan di pelabuhan yang akan dipersiapkan sebagai pelabuhan utama bagi Provinsi Riau. Kerjasama antar

daerah sangat diperlukan untuk membuka jaringan jalan sebagai sarana transportasi darat yang akan mengakses langsung ke pelabuhan-pelabuhan tersebut sehingga membuka daerah baru yang selama ini terisolir di kawasan tersebut dan merangsang pertumbuhan ekonomi baru.

2. Tantangan

1. Isu Lingkungan Hidup.

Dinamika sikap dan pandangan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk mewujudkan otonomi daerah, terutama dalam hal manajemen pembangunan, manajemen keuangan daerah, kebijakan fiskal, dan kebijakan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam telah membuat suasana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tidak pasti dan sulit dilakukan perkiraan. Hal ini menantang kemampuan dan kapasitas Pemerintah Provinsi Riau beserta seluruh komponen penyelenggara pemerintahan untuk selalu mengawasi, menuntut dan memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan sikap ketidak-adilan dan kurangnya proporsionalitas terhadap Provinsi Riau dari Pemerintah Pusat.

Posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki selain berpotensi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, juga merupakan tantangan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat lainnya untuk melestarikan lingkungan hidup. Keberadaan instansi pemerintah yang khusus membidangi lingkungan hidup ditempatkan sebagai koordinator dengan memaksimalkan peran serta seluruh SKPD, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan, serta tersedianya pranata dan perangkat pengaturan dan pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan dapat menjadi modal dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

2. Pemerintahan Yang Baik.

Dampak dari globalisasi yang telah menimbulkan konsekuensi logis berupa perubahan lingkungan strategis yang berdimensi politik, ekonomi, dan sosial budaya baik pada tataran nasional maupun regional, dengan tuntutan yang mengarah pada transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, dan persaingan, merupakan sesuatu yang apabila tidak dikelola dengan baik dan hati-hati akan dapat menimbulkan persoalan yang dapat mengganggu proses perwujudan visi ke depan. Sementara itu apabila melihat dari kondisi dan kemampuan yang ada, maka baik pada tataran pemerintahan maupun kemasyarakatan diperlukan

suatu upaya yang peningkatan kualitas dan kemampuan untuk menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat tersebut agar benar-benar secara nyata mampu dan siap untuk bersaing dan bersanding dalam kancah pergaulan internasional dan regional yang setara.

3. Dinamika dan Fluktuasi Keadaan Ekonomi.

Pemekaran wilayah yang pada dasarnya bertujuan untuk memperpendek rentang kendali administrasi pemerintah dan mempercepat proses pembangunan guna pemberdayaan masyarakat, menimbulkan persepsi yang keliru karena diartikan sebagai pemisahan dan pemutusan seluruh hubungan emosional masyarakat dari masing-masing daerah, yang mendorong terputusnya hubungan ekonomi dan sosial budaya. Akibatnya akan timbul kesan semakin terkotak-kotaknya masyarakat dalam skala kecil dan sempit, bahkan ada kecenderungan tidak ada hubungan apapun satu dengan yang lain. Hal tersebut akan mengancam eksistensi dan integritas masyarakat yang telah dikenal dengan nilai-nilai kemelayuannya secara kental. Pada hal apabila momentum tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh berbagai pihak merupakan suatu peluang bagi upaya penegakan kembali dan mempertahankan nilai-nilai "Kebudayaan Melayu" bagi seluruh masyarakat yang pada masa sebelum ini telah mengalami tekanan yang cukup kuat dan berat dari berbagai pihak hanya untuk kepentingan pengeksploitasian kekayaan daerah.

Masalah pokok pasca pemekaran adalah membangun dan mengembangkan kawasan yang dapat menjadi penghubung strategis dengan daerah lain. Di sisi lain, masih banyaknya daerah yang terisolir dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengimbangi perkembangan wilayah dan mewujudkan visi pembangunannya, maka tantangan yang dihadapi adalah masalah keterbatasan akses transportasi terutama yang menuju ke kantong-kantong produksi yang di daerah pedesaan, komunikasi, informasi, serta pengadaan infrastruktur air bersih dan tenaga listrik yang baik dan memadai.

Sebagai efek dari perbedaan yang cukup tajam terhadap tingkat kesejahteraan antara petani tanaman pangan dengan perkebunan dan adanya tuntutan pasar dengan tingkat harga yang menjanjikan terhadap produk-produk pertanian perkebunan, telah mengakibatkan timbulnya alih fungsi dalam pemanfaatan lahan antara pertanian padi dengan perkebunan. Hal ini akan mengancam luasan lahan pertanian padi yang semakin kecil, sementara pembukaan lahan pertanian padi yang baru relatif tidak ada.

Tantangan lain yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah persoalan kemiskinan, merupakan masalah yang kompleks yang

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

4. Kebijakan Pemerintah Pusat Yang Berubah-ubah.

Masih lemahnya kualitas sumberdaya manusia juga menjadi tantangan tersendiri karena pembangunan sumberdaya manusia bersifat holistik yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Indeks pembangunan manusia sebesar 74,6 berada pada tingkat ke tiga setelah DKI Jakarta dan Sulawesi Utara, dan masih berada di bawah rata-rata standar WHO adalah 80. Cukup tinggi IPM Riau di satu sisi mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan sumberdaya manusia selama ini, namun di sisi kondisi telah merugikan daerah berupa penurunan berbagai bentuk alokasi kegiatan pembangunan dari Pemerintah Pusat karena telah dianggap maju kualitas sumberdaya manusianya yang hampir setara dengan kedua provinsi tersebut. Pada hal kenyataan yang ada tidak demikian oleh karena masih banyak permasalahan mendasar lainnya diluar variable untuk menghitung indikator IPM tersebut, seperti masalah kesejahteraan, keterbatasan infrastruktur, persaingan dengan negara tetangga, kerawanan dan sebagainya.

Kekayaan sumberdaya pesisir dan kelautan menjadi penting bagi pengembangan perekonomian pada masa mendatang melalui kegiatan perikanan, wisata bahari, dan jasa kelautan lain. Potensi perikanan terdapat di Pulau Rupa, Pulau Jemur, dan sekitar Selat Melaka. Potensi perikanan dan rumput laut dapat diusahakan di sekitar Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang, Pesisir Rokan Hilir dan Selat Melaka.

5. Keterbukaan Daerah.

Provinsi Riau masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam hal mobilitas penduduk barang dan jasa. Infrastruktur yang ada masih terbatas, di samping itu sarana dan prasarana pengangkutan darat, sungai dan laut belum cukup memadai. Aksesibilitas beberapa daerah sentra produksi dan sentra perdagangan juga dirasakan masih sangat rendah sehingga menghambat perkembangan perdagangan. Dumai, Kuala Enok, Buton yang dicadangkan menjadi kawasan andalan Provinsi Riau belum dapat dikembangkan karena rusak jalan yang menghubungkan ke pelabuhan belum berfungsi se penuhnya serta masih terbatasnya infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki. Disamping itu permasalahan utama di pedesaan, terbatasnya sarana jalan, jembatan dan jalan

poros padahal infrastruktur ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial.

6. Globalisasi.

Globalisasi merupakan tantangan paling utama bagi daerah, terutama dalam upaya bersaing dengan provinsi tetangga maupun antar negara berdekatan untuk menjual potensi dan mengembangkan infrastruktur. Guna menghadapi tantangan yang berat tersebut diperlukan strategi untuk memanfaatkan secara optimal terhadap sistem dan pranata yang dimiliki agar Provinsi Riau dapat menjadi pusat pelayanan barang dan jasa. Oleh karena itu, kedepan Provinsi Riau akan menjadi pusat pelayanan di wilayah pantai timur Sumatera.

Lingkungan hidup yang lestari menjadi salah satu tuntutan global yang memberikan implikasi terhadap kegiatan pembangunan secara menyeluruh. Mau tidak mau, suka tidak suka globalisasi akan memasuki semua lapisan kehidupan, sementara masyarakat yang berdomisili di wilayah pedesaan belum siap menghadapi tuntutan tersebut. Pemerintah Provinsi Riau telah memperkuat dan mewujudkan *trade barrier*, standar mutu lingkungan bagi produk yang memasuki pasar internasional, berbagai peraturan terkait konvensi internasional yang telah diretifikasi dan sebagainya.

Berdasarkan analisa di atas, Isu-isu strategis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Provinsi Riau untuk menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) Kebodohan juga masih menjadi masalah serius di tengah-tengah kehidupan masyarakat Riau, ini ditandai dengan tingginya jumlah penduduk tamat/tidak tamat SD/MI berkisar 43,57% pada tahun 2007. Demikian juga persoalan gizi yang membutuhkan perbaikan/peningkatan kualitas serta masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan keselamatan anak;
- 2) Kemiskinan masih melanda sebagian kehidupan masyarakat di Provinsi Riau (10,63%) terutama bagi penduduk pedesaan yang berada di daerah aliran sungai (DAS); daerah terisolir dan pedalaman, pulau-pulau kecil di pesisir pantai dan pulau terluar, bahkan sebagian diantaranya di daerah perkotaan;
- 3) Infrastruktur masih terbatas dan ketersediaannya-pun belum merata, terutama infrastruktur utama (fasilitas umum) di pedesaan yang menunjang sendi-sendi perekonomian rakyat serta dalam mendukung investasi dalam kawasan andalan, kawasan wilayah, kawasan industri, kawasan ekonomi, kawasan agropolitan dan pusat kegiatan nasional (PKN) maupun pusat kegiatan lokal (PKL);

-
- 4) Pasokan pangan selama ini diimpor dari provinsi tetangga dan negara jiran membawa konsekuensi ketergantungan yang sangat tinggi dan berdampak terhadap harga dan kualitas barang apabila terjadi kendala transportasi dan sebagainya. Isu yang diketengahkan ke depan adalah untuk menjadikan Riau Swasembada Beras dan kebutuhan pokok lainnya dengan melaksanakan revitalisasi pertanian. Aktivitas tersebut melalui kerjasama daerah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;
 - 5) Riau dijadikan lokasi penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012. Persiapan dini yang harus dilakukan mulai dari sekarang dengan membangun dan membenahi sarana, prasarana fisik serta pembinaan atlet. PON XVIII yang akan dilaksanakan di sejumlah tempat di Provinsi Riau menggantungkan beberapa target sukses;
 - 6) Masih lemahnya sistem dan tata kelola pemerintahan serta kadar profesional aparaturnya mendapat perhatian serius untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Pemerintahan yang baik (*Good Governance dan Clean Government*) dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat; penegakan dan perlindungan hukum dan HAM; mendukung dan melanjutkan upaya pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi, penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan kondisi rukun antar umat beragama;
 - 7) Kebudayaan Melayu merupakan potensi dan aset daerah yang dimiliki Provinsi Riau telah ditempatkan sebagai akar jati diri negeri ini. Berdasarkan potensi ini kembali harus ditempatkan sebagai payung negeri untuk mempersatukan budaya lainnya yang ada di Provinsi Riau. Pengembangan dan pelestarian menempatkan Provinsi Riau sebagai pusat bahasa dan dokumentasi melayu, serta pusat pendidikan melayu yang diaktualisasikan melalui lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
 - 8) Objek wisata Riau belum dikembangkan secara optimal, padahal bumi melayu Riau bukan hanya melimpah minyak didalam kandungan perut bumi, melainkan alam yang membentang dipermukaan yang ditumbuhi hutan belantara dan tanaman industri, serta keindahan pegunungan, pantai pesisir dan laut menjadi sangat menarik wisatawan apabila dikelola secara terpadu. Perlu pengembangan sebagai wisata idola Indonesia Bagian Barat. Provinsi Riau juga memiliki event-event pariwisata bertaraf nasional dan internasional.
 - 9) Pembangunan pedesaan yang selalu didorong dari atas membutuhkan kebijakan dengan pendekatan *Bottom Up*. Desa mandiri perlu diwujudkan dalam target dan tahapan tertentu dengan membuat peraturan sebagai

payung hukum. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam upaya mengurus aset dan mengembangkan diri secara mandiri yang diselenggarakan secara demokratis, transparan, akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian lembaga pemerintah desa, adat dan lembaga lainnya;

- 10) Isu lingkungan hidup, antara lain kabut asap disebabkan kebakaran hutan/lahan baik kebakaran yang terjadi di Provinsi Riau maupun provinsi tetangga, Masalah banjir, pencemaran dan pengrusakan lingkungan membutuhkan sistem koordinasi dan sosialisasi yang baik serta penegakan hukum.

BAB V

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI RIAU****A. Visi Pembangunan Provinsi Riau**

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005 - 2025 (sesuai UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPD Nasional 2005 - 2025) merupakan kristalisasi komitmen dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat Riau sebagaimana dinyatakan dalam Visi Riau 2020 (sesuai Perda No. 36 Tahun 2001) yang relevan untuk melandasi pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yakni :

"Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020"

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDD) Provinsi Riau di atas, maka Kepala Daerah menyusun *Visi Antara* pembangunan jangka menengah lima tahunan kedua yang ditetapkan sebagai Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013 yaitu:

"Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang mapan dan Pengembangan Budaya Melayu secara Proporsional melalui Kesiapan Infrastruktur dan Peningkatan Pembangunan Pendidikan dalam Masyarakat yang Agamis"

1. ***Pembangunan Ekonomi yang mapan*** merupakan kondisi perekonomian yang dalam berbagai sektor sudah berjalan dengan baik atau tidak mudah dipengaruhi oleh fluktuasi dan perkembangan perekonomian yang datang dari luar sehingga terwujudnya Riau sebagai pusat perekonomian yang memiliki kawasan terbesar, unggul, serta mampu bersaing dan berpengaruh dalam

seluruh kegiatan ekonomi, perdagangan, dan lalu-lintas barang dan jasa. Kemapanan ekonomi ini terletak pada sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.

2. **Pengembangan Budaya Melayu secara Proporsional** merupakan upaya terus-menerus untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri dan menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Provinsi Riau.
3. **Kesiapan Infrastruktur** merupakan tersedianya prasarana dasar yang mendukung lancarnya arus barang, jasa, orang, dan informasi antara masyarakat dengan pemerintah serta pelaku ekonomi lainnya. Kesiapan infrastruktur bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan seluruh potensi daerah sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan kapasitas daerah yang kuat untuk kemakmuran rakyat.
4. **Peningkatan Pembangunan Pendidikan** merupakan upaya terus-menerus mempersiapkan sumber daya manusia di Provinsi Riau agar memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis iman dan taqwa. Upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan meningkatkan mutu, pemerataan, dan keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan bagi semua penduduk melalui penyelenggaraan pendidikan yang responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan pembangunan.
5. **Masyarakat yang Agamis** merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang mengamalkan ajaran agama secara konsisten untuk terwujudnya suasana kehidupan yang harmonis, sejahtera, lahir dan batin.

B. Misi Pembangunan Provinsi Riau

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah yang profesional dan bermoral melalui keteladanan pemimpin dan aparat.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai kelanjutan pengentasan kebodohan.
3. Memperkuat keseimbangan pembangunan antar-wilayah sebagai kelanjutan pembangunan infrastruktur.
4. Meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi sumberdaya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui perkuatan koperasi dan UKM sebagai kelanjutan pengentasan kemiskinan.

-
-
5. Meningkatkan penanaman modal untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan perekonomian yang mapan.
 6. Meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan di pedesaan dalam pembangunan.
 7. Mewujudkan budaya melayu menjadi payung kebudayaan daerah dan alat pemersatu berbagai budaya yang ada di Provinsi Riau.
 8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan lingkungan.
 9. Meningkatkan kemampuan penanganan permasalahan regional dan global secara terpadu dan berkesinambungan.

C. Tujuan Pembangunan Provinsi Riau 2009-2013

Sebagaimana diungkapkan pada bab pendahuluan bahwa tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Riau adalah untuk menyusun mekanisme, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Riau tahun 2009-2013 agar dilaksanakan secara terpadu, sinkronisasi, lancar dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Provinsi Riau. Mengingat RPJMD ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka secara teknis bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja Aparat Pemerintahan Daerah yang profesional dan bermoral serta memiliki keteladanan pemimpin dengan mewujudkan Aparatur pemerintah yang berkualitas, penguatan kapasitas SKPD dan menegakan hukum secara optimal;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan mengentaskan kebodohan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kualitas layanan dan kesehatan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3. Memperkuat keseimbangan pembangunan antar-wilayah dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam sinergi keadilan dan pemerataan yang dilandasi dengan pengelolaan tata ruang daerah;
4. Meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi dan UKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi makro dan penyebaran distribusi pendapatan yang proporsional;

-
-
5. Meningkatkan penanaman modal dalam upaya mendukung pertumbuhan dan pembangunan perekonomian yang mapan di Provinsi Riau melalui peningkatan investasi dengan penguatan dukungan sistem dan keuangan daerah;
 6. Meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan di pedesaan dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan pedesaan menuju desa mandiri;
 7. Mewujudkan budaya melayu menjadi payung kebudayaan daerah dan alat pemersatu berbagai budaya yang ada di Provinsi Riau dengan menggali, melestarikan dan mengaktualisasikannya ke dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Riau sebagai bagian dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
 8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan lingkungan dengan memperbaiki, memperbaharui, mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup di Provinsi Riau;
 9. Meningkatkan kemampuan penanganan permasalahan regional dan global secara terpadu dan berkesinambungan dengan meningkatkan daya saing dan kolaborasi daerah.

D. Sasaran Pembangunan Provinsi Riau

1. Rencana Makro Ekonomi Tahun 2009-2013

Pada tahun 2009, rencana PDRB Harga Berlaku berkisar Rp 167.781,69 miliar, dan diperkirakan pada tahun 2013 akan mencapai Rp. 372.583,89 miliar, bersumber dari sumbangan sektor Industri sebesar Rp 49.709,38 miliar atau 29,63 %, Dari sektor Pertanian sebesar Rp 62.977.00 miliar atau 37,53 % dan dari sektor lainnya sebesar Rp 56.095.11 miliar atau 37,84 %. Peranan Sektor Pertanian menurun 0,4 % dari 37,53 % tahun 2009 menjadi 37,49 % di tahun 2013. Penurunan tersebut juga terjadi pada sektor bangunan dan jasa.

Tabel 5.1

Rencana Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Riau Tanpa Migas (Miliar Rp) Tahun 2009-2013

SEKTOR	2009	2010	2011	2012	2013
1. PERTANIAN	62.977,00	75.312,80	91.566,03	112.094,40	139.705,68
-Tanaman Pangan	3.021,77	3.346,11	3.773,46	4.313,21	5.039,19
- Perkebunan	33.873,40	40.997,96	50.385,01	62.241,18	78.188,09
- Peternakan	1.529,34	1.771,08	2.089,60	2.491,89	3.032,99
- Kehutanan	19.244,33	22.944,50	27.819,72	33.977,29	42.259,39
- Perikanan	5.308,16	6.253,15	7.498,24	9.070,83	11.186,02
2. PERTAMBANGAN	3.315,88	4.221,22	5.414,06	6.920,66	8.947,09
3. INDUSTRI	49.709,38	58.958,88	71.145,70	86.538,06	107.241,26
4. LISTRIK	520,45	601,35	708,00	842,59	1.023,69
5. BANGUNAN	10.252,64	12.584,18	15.658,12	19.636,10	24.754,78
6. PERDAGANGAN	20.315,32	24.435,35	29.863,75	36.720,02	45.941,89
7. PENGANGKUTAN	5.336,12	6.305,43	7.582,55	9.195,60	11.365,99
8. KEUANGAN & BANK	5.906,79	7.170,00	8.834,37	10.936,52	13.763,99
9. JASA	9.447,91	11.118,72	13.320,11	16.100,54	19.840,31
P D R B	167.781,49	200.707,93	244.090,69	298.984,49	372.583,89

Keterangan : Tahun 2009 – 2013 Angka Proyeksi

Dari tabel tersebut diketahui bahwa hasil prediksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2009 s.d. 2013, diprediksi akan meningkat dari Rp. 167.781,49 miliar menjadi Rp. 372.583,89 miliar, (122,06%). Selanjutnya distribusi persentase PDRB dari tahun 2009 s.d 2013 mengalami fluktuasi, dimana persentase kontribusi pertanian cenderung menurun dari 37,53 % menjadi 37,49 %. Hal ini diikuti oleh industri dari 29,63 % menjadi 28,78 % serta sektor jasa dari 5,63% menjadi 5,35%. Sedangkan persentase kontribusi perdagangan meningkat yaitu dari 12,11 % menjadi 12,33 % pada tahun 2013.

Peranan masing-masing sektor antara tahun 2009 sampai tahun 2013 seperti Sektor pertanian peranannya relatif menurun dari 37,53 % menjadi 37,49 %, dan ada Sub sektor yang berperan penting yaitu Sub sektor perkebunan naik dari 20,19 % menjadi 12,99 %, sedangkan Sub sektor yang memiliki rata-rata menurun antara lain kehutanan dari 11,47 % menjadi 11,34 %, perikanan dari 3,16 % menjadi 3,00%. Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku selama periode 2009 – 2013 tersebut dapat diperhatikan tabel berikut.

Tabel 5.2
Distribusi Prosentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas (Persen)
Provinsi Riau Tahun 2009-2013

SEKTOR	2009	2010	2011	2012	2013
1. PERTANIAN	37,53	37,53	37,52	37,48	37,49
- Tanaman Pangan	1,80	1,67	1,55	1,44	1,35
- Perkebunan	20,19	20,43	20,64	20,82	20,99
- Peternakan	0,91	0,88	0,86	0,83	0,81
- Kehutanan	11,47	11,43	11,40	11,36	11,34
- Perikanan	3,16	3,12	3,07	3,03	3,00
2. PERTAMBANGAN	1,98	2,10	2,22	2,31	2,40
3. INDUSTRI	29,63	29,38	29,15	28,94	28,78
4. LISTRIK	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27
5. BANGUNAN	6,11	6,27	6,41	6,57	6,64
6. PERDAGANGAN	12,11	12,17	12,23	12,28	12,33
7. PENGANGKUTAN	3,18	3,14	3,11	3,08	3,05
8. KEUANGAN DAN BANK	3,52	3,57	3,62	3,66	3,69
9. JASA	5,63	5,54	5,45	5,40	5,35
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : Tahun 2009 – 2013, Angka Proyeksi

Kemudian, berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000, jumlah PDRB pada tahun 2009 berjumlah sebesar Rp 45.950,53 miliar dengan sumbangan Sektor pertanian sebesar Rp 17.233,01 miliar, Sektor Industri Rp 7.982,85 miliar, Sektor Jasa Rp 4.638,84 miliar dan Sektor Perdagangan Rp 7.885,66 miliar, termasuk sektor-sektor lainnya sebesar Rp 8.210,17 miliar. Terdapat empat sektor yang berperan penting di sini yaitu pertanian, industri, jasa dan perdagangan.

Tabel 5.3
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
 Provinsi Riau Tanpa Migas (Miliar Rp)
 Tahun 2009-2013

SEKTOR	2009	2010	2011	2012	2013
1. PERTANIAN	17,233.01	18,333.26	19,516.56	20,778.27	22,143.29
-Tanaman Pangan	1,917.72	2,005.07	2,097.30	2,195.87	2,300.17
-Perkebunan	6,662.48	7,216.80	7,830.13	8,515.38	9,281.76
-Peternakan	846.37	895.04	948.74	1,008.04	1,073.56
-Kehutanan	6,121.17	6,406.14	6,694.42	6,962.20	7,223.28
-Perikanan	1,685.27	1,810.21	1,945.97	2,096.78	2,264.52
2. PERTAMBANGAN	830.46	975.79	1,151.43	1,370.20	1,637.39
3. INDUSTRI	7,982.85	8,701.52	9,506.41	10,433.28	11,466.17
4. LISTRIK	241.84	276.91	319.83	370.20	429.43
5. BANGUNAN	2,996.40	3,213.64	3,456.27	3,728.86	4,020.20
6. PERDAGANGAN	7,885.66	8,713.65	9,693.94	10,857.21	12,241.50
7. PENGANGKUTAN	2,851.30	3,079.40	3,328.83	3,603.46	3,909.75
8. KEUANGAN DAN BANK	1,290.17	1,451.44	1,640.13	1,854.99	2,099.85
9. JASA	4,638.84	4,995.88	5,383.07	5,813.72	6,307.87
PDRB	45,950.53	49,741.49	53,996.47	58,810.19	64,255.45

Keterangan : Tahun 2009 – 2013, Angka Proyeksi

Berdasarkan pertumbuhan PDRB atas harga konstan terlihat bahwa peran sektor pertanian terus meningkat dari 5,92% pada tahun 2009 menjadi 6,56% pada tahun 2013. Sedangkan peran Sektor Industri pada tahun 2009 sebesar 7,14 % dan pada tahun 2013 naik menjadi 9,90 % yaitu berada di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 9,26%. Peranan Sektor Jasa juga meningkat dari 5,35 % pada tahun 2009 menjadi 8,50% pada tahun 2013. Peranan Sektor Perdagangan meningkat dari 12,87 % pada tahun 2009 menjadi 12,75 % pada tahun 2013 dengan pertumbuhan rata-rata 11,87%, berada di atas pertumbuhan ekonomi tahun 2013.

Dengan demikian peranan sektor pertanian, industri, jasa dan perdagangan tahun 2009 menunjukkan bahwa secara perlahan-lahan struktur perekonomian Provinsi Riau menuju kepada keseimbangan, dimana peranan sektor pertanian dan industri akan beralih kepada sektor-sektor lainnya, khususnya kepada sektor yang

banyak menyerap tenaga kerja untuk menampung tambahan angkatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, rencana pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor direncanakan akan bertambah secara bertahap dan berkesinambungan agar tidak terjadi kejutan-kejutan atau perubahan drastis, yang mungkin saja akan mengganggu mekanisme perencanaan yang sedang ditata.

Tabel 5.4
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas (Persen)
Provinsi Riau Tahun 2009-2013

SEKTOR	2009	2010	2011	2012	2013
1. PERTANIAN	5,92	6,38	6,45	6,46	6,56
- Tanaman Pangan	3,93	4,55	4,60	4,70	4,75
- Perkebunan	7,58	8,32	8,50	8,75	9,00
- Peternakan	6,45	5,75	6,00	6,25	6,50
- Kehutanan	4,47	4,65	4,50	4,00	3,75
- Perikanan	6,84	7,41	7,50	7,75	8,00
2. PERTAMBANGAN	18,07	17,50	18,00	19,00	19,50
3. INDUSTRI	7,14	9,00	9,25	9,75	9,90
4. LISTRIK	14,35	14,50	15,50	15,75	16,00
5. BANGUNAN	6,80	7,25	7,55	7,80	7,90
6. PERDAGANGAN	12,87	10,50	11,25	12,00	12,75
7. PENGANGKUTAN	7,24	8,00	8,10	8,25	8,50
8. KEUANGAN DAN BANK	14,12	12,50	13,00	13,10	13,20
9. JASA	5,35	7,69	7,75	8,00	8,50
P D R B	7,95	8,25	8,55	8,90	9,26

Keterangan : Tahun 2009 – 2013, Angka Proyeksi

2. Rencana Investasi Riau Tahun 2009 – 2013

Investasi Provinsi Riau tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bertujuan untuk memenuhi sasaran ekonomi makro yang direncanakan untuk hal-hal sebagai berikut: (1) mencapai laju pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 8,56% setahun, (2) menambah kesempatan kerja rata-rata 4,89% setahun, (3) menampung tambahan angkatan kerja rata-rata 3,69% setahun, (4) mempertahankan

keseimbangan struktur perekonomian daerah yang terdiri dari sektor pertanian, industri, jasa dan perdagangan, dan (5) mengurangi tingkat pengangguran dari 17,75% menjadi 12,25% pada tahun 2013.

Berdasarkan harapan di atas, maka sikap optimis dikembangkan untuk mencapai sasaran kebutuhan investasi yang direncanakan tersebut. Berikut ini dikemukakan beberapa asumsi untuk menetapkan jumlah investasi antara lain:

- (1) Jumlah PDRB Harga Berlaku dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp 1.284.148,49 miliar;
- (2) Tingkat inflasi rata-rata 12,79 % setahun;
- (3) Pertumbuhan ekonomi rata-rata 8,56% setahun;
- (4) Prosentase jumlah investasi dengan jumlah PDRB 59,02 %.
- (5) Angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) 2,77%.

Tabel 5.5
Perkiraan Investasi Provinsi Riau Tanpa Migas (Miliar Rp)
Tahun 2009-2013

SEKTOR	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
1. PERTANIAN	44.613,01	49.691,87	62.593,48	68.715,02	78.591,60	304.194,88
- Tanaman Pangan	1.150,69	1.436,15	1.687,87	2.158,76	2.968,33	9.401,80
- Perkebunan	20.862,62	25.828,71	34.614,50	36.614,37	40.063,58	157.988,78
- Peternakan	673,52	980,03	1.121,49	1.678,91	1.975,39	6.429,34
- Kehutanan	4.792,77	5.752,37	20.690,92	22.557,52	25.751,82	105.352,56
- Perikanan	2.681,68	3.339,18	4.478,70	5.706,46	7.822,38	24.028,40
2. PERTAMBANGAN	2.823,14	3.459,71	4.590,04	4.813,32	6.549,27	22.235,48
3. INDUSTRI	30.847,16	32.916,74	36.764,54	46.795,46	51.304,22	198.628,12
4. LISTRIK	299,78	373,80	502,11	560,32	769,97	2.505,98
5. BANGUNAN	6.985,14	8.584,92	11.964,78	12.478,24	16.127,74	55.601,32
6. PERDAGANGAN	11.975,88	14.866,47	16.589,31	21.077,29	23.072,02	87.580,97
7. PENGANGKUTAN	3.219,81	4.051,86	4.606,40	4.889,76	6.702,63	23.470,46
8. KEUANGAN & BANK	3.710,50	4.600,99	5.126,14	6.507,29	8.894,98	28.840,04
9. JASA	4.764,58	5.897,35	6.593,45	8.400,46	9.217,81	34.873,65
Jumlah	109.199,14	124.443,71	148.830,25	174.237,66	201.220,14	757.930,90

Asumsi:

Jumlah PDRB Harga Berlaku	: 1.284.148,49 Miliar
Jumlah Investasi	: 757.930,90 Miliar
Pertambahan PDRB	: 21,28 %
Prosentase Investasi dengan PDRB	: 2,77 %

Dengan memperhitungkan asumsi di atas maka jumlah investasi yang dibutuhkan dari tahun 2009 s.d 2013 diperkirakan berjumlah Rp 757.930,90 miliar, dengan perincian:

(1) Sektor Pertanian	Rp 304.194,88 miliar
a. Tanaman Pangan	Rp 9.401,80 miliar
b. Perkebunan	Rp 157.988,78 miliar
c. Peternakan	Rp 6.429,34 miliar
d. Kehutanan	Rp 105.352,56 miliar
e. Perikanan	Rp 24.028,40 miliar
(3) Sektor Industri	Rp 198.628,12 miliar
(4) Sektor Perdagangan	Rp 87.580,97 miliar
(5) Sektor Jasa	Rp 34.873,65 miliar
(6) Sektor-sektor Lainnya	Rp 132.653,28 miliar

Menyangkut dengan angka ICOR berdasarkan harga berlaku maka jika jumlah PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 adalah Rp. 1.284.148,49 miliar, jumlah investasi Rp. 757.930,90 miliar, sehingga perbandingan antara jumlah PDRB harga berlaku dengan jumlah investasi adalah 59,02 % dan pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata 21,28 %, maka angka ICOR sebesar 2,77.

Tetapi jika dilihat berdasarkan harga konstan Tahun 2000, maka jumlah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk tahun 2009 – 2013 sebesar Rp. 272.754,113 miliar dan jumlah investasi menurut harga berlaku Rp. 757.930,90 miliar setelah dibagi dengan Indeks Implisit besarnya adalah Rp. 87.554,08 miliar, sehingga perbandingan prosentase antara jumlah PDRB dengan jumlah investasi tersebut sebesar 32,10 % dan apabila rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 8,56 %, maka angka ICOR berdasarkan harga konstan adalah 3,75. Tetapi angka incor dengan harga konstan tidak mungkin digunakan untuk menghitung Investasi karena investasi selalu dalam harga berlaku.

Berhubungan dengan menentukan tingkat inflasi digunakan perhitungan bunga bersusun dengan cara menentukan pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku kemudian dikurangi dengan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan, maka sisanya adalah tingkat inflasi. Pada tahun 2009 pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 19,78%, pertumbuhan ekonomi atas dasar konstan 7,95% maka tingkat inflasi pada tahun 2009 sebesar 11,83%. Demikian

dilakukan perhitungan tingkat inflasi setiap tahun sehingga rata-rata tingkat inflasi setahun adalah 12,79% dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

Distribusi investasi untuk sektor pertanian, industri, bangunan, jasa dan sektor perdagangan sebesar 94,05 % dan untuk sektor lainnya sebesar 5,95 % yang merupakan sektor penunjang. Pada tahun 2009 jumlah investasi direncanakan Rp 109.199,14 miliar, Untuk pertanian Rp 44.613,01 miliar, Industri Rp 30.847,16 miliar, Jasa Rp 4.764,58 miliar, bangunan Rp 6.945,14 miliar dan perdagangan Rp 11.975,88 miliar. Tahun 2013, investasi meningkat hampir dua kali lipat yaitu sebesar Rp 201.220,14 miliar, Untuk pertanian Rp 78.581,50 miliar, Industri Rp 51.304,22 miliar, Jasa Rp 9.217,81 miliar, bangunan Rp 16.127,74 dan perdagangan Rp 23.072,02 miliar. Rencana pendapatan Provinsi Riau diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 5.6
Perkiraan Pendapatan Provinsi Riau (Milyar Rp)
Tahun 2009-2013

URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
PENDAPATAN	3,262.13	3,560.36	3,774.73	4,014.78	4,271.09
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,276.28	1,338.42	1,403.64	1,483.73	1,568.46
-PAJAK DAERAH	1,058.65	1,111.58	1,167.16	1,237.19	1,311.42
-RESTRIBUSI DAERAH	36.74	38.55	40.48	42.51	44.64
-LABA BUMD/USAHA DAERAH	109.17	112.99	116.94	121.03	125.26
-PENDAPATAN LAINNYA	71.72	75.30	79.06	83.00	87.14
B. PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH	1,985.85	2,221.94	2,371.09	2,531.05	2,702.63
-BAGI HASIL BUKAN PAJAK	1,787.85	1,921.94	2,066.09	2,221.05	2,387.63
-DANA ALOKASI UMUM (DAU)	198.00	200.00	205.00	210.00	215.00
-DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	-	100.00	100.00	100.00	100.00
C. PENDAPATAN LAINNYA	-	-	-	-	-
D. BELANJA	4,006.11	4,060.36	4,324.73	4,514.78	4,771.09
-TIDAK LANGSUNG	1,661.01	1,683.50	1,793.11	1,871.91	1,978.18
-LANGSUNG	2,345.10	2,376.86	2,531.62	2,642.87	2,792.91
E. DEFISIT	744.01	500.00	550.00	550.00	550.00
F. PERSENTASE DEFISIT DENGAN PDRB	0,47	0,25	0,23	0,17	0,14

Sumber: Diproyeksi dari APBD Provinsi Riau Tahun 2004 - 2008

Pendapatan asli daerah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 diperkirakan akan meningkat rata-rata 5,29 % setahun yang terdiri dari peningkatan:

- (1) Pajak daerah 5,50%
- (2) Retribusi daerah 4,98%

(3) Laba BUMD dan lainnya	3,50%
(4) Dana Perimbangan Keuangan	8,01%
(5) Dana Alokasi Umum	2,08%
(6) Dana Alokasi Khusus	- %

Berdasarkan asumsi di atas maka penerimaan daerah untuk tahun 2009 sebesar Rp.1.058.65 Milyar dan pada tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp. 1.311.42 Milyar dengan rata-rata pertumbuhannya setiap tahun 11,26%.

3. Rencana Distribusi Pendapatan Tahun 2009 – 2013

Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,35 % dan pertumbuhan penduduk sebesar 3,17 % yang diikuti oleh pertumbuhan tenaga kerja 4,05 % dan angkatan kerja 3,69 %, yang semuanya berada di bawah pertumbuhan ekonomi, sehingga diharapkan akan menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok masyarakat dan Indeks Gini *Ratio*. Masyarakat dibagi atas tiga kelompok yaitu 40 % penduduk yang berpenghasilan rendah, 40 % berpenghasilan sedang dan 20 % berpenghasilan tinggi. Sedangkan yang dijadikan indikator adalah 40 % penduduk yang berpenghasilan rendah, jika jumlah pendapatan yang diterima penduduk semakin besar, maka dikatakan distribusi pendapatan atau distribusinya semakin merata. Sedangkan kelompok lainnya dijadikan sebagai pembanding. Angka Indeks Gini *Ratio* menunjukkan tingkat pemerataan, yaitu apabila Angka Indeks Gini semakin besar maka distribusi pendapatan semakin tidak merata, tetapi apabila Angka Indeks Gini semakin kecil maka distribusi pendapatan semakin merata.

Tabel 5.7

Sasaran Distribusi Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013

Kelompok Masyarakat	Persentase Pendapatan Diterima	
	2009	2013
40 % Penduduk yang berpenghasilan rendah	15,96	21,23
40 % Penduduk yang berpenghasilan sedang	46,69	44,77
20 % Penduduk yang berpenghasilan tinggi	37,35	34,00
Angka Indeks Gini <i>Ratio</i>	0,3657	0,3125
Kriteria	Sedang	Baik

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 40% penduduk yang berpenghasilan rendah, persentase pendapatan diterimanya meningkat dari 15,96% tahun 2009, menjadi 21,23% pada tahun 2013. dan 40% penduduk yang

berpenghasilan sedang, persentase pendapatan diterimanya turun dari 46,69 % menjadi 44,77%, sedangkan 20% penduduk yang berpenghasilan tinggi, persentase pendapatan yang diterima akan menurun dari 37,35% menjadi 34,00%. Makin baiknya distribusi pendapatan masyarakat tersebut, diperkuat dengan makin kecilnya Angka Indeks Gini Ratio dari 0,3657 tahun 2009 menjadi 0,3125, yang berarti makin kecilnya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di Riau. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa selama periode Tahun 2009 – 2013 untuk Provinsi Riau diharapkan akan terwujud: (1) Pemerataan hasil-hasil pembangunan untuk berbagai kelompok masyarakat, dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu jika di dalam PDRB atas dasar harga berlaku termasuk Migas maka distribusi Pendapatan menurut Kelompok masyarakat semakin tidak merata atau mempunyai ketimpangan yang amat tinggi, hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5.8

Sasaran Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Termasuk Migas (%)
Provinsi Riau Tahun 2007 – 2009

NO	KELOMPOK MASYARAKAT	2007	2009
1.	40% penduduk yang berpenghasilan rendah menerima	3,45	3,39
2.	40% penduduk yang berpenghasilan sedang menerima	10,29	17,27
3.	20% penduduk yang berpenghasilan tinggi menerima	79,34	86,26
4.	Indek Gini Ratio	0,8116	0,8275

Dengan memperhatikan distribusi pendapatan menurut kelompok masyarakat tersebut dari Tahun 2007 ke Tahun 2009, sangat jelas kelihatan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata dan semakin timpang. Hal ini disebabkan oleh produksi Minyak dan Gas yang sumbangannya terhadap PDRB harga berlaku semakin besar yaitu di Tahun 2009 diperkirakan 54,44% (Migas dan Industri Migas), jika produksi Migas diperkirakan bertambah setiap tahunnya hanya 20% saja maka dapat dibayangkan distribusi pendapatan akan semakin tidak merata.

Oleh karena itu dalam kurun waktu Tahun 2009 – 2013 perlu diambil langkah-langkah untuk menahan agar sumbangan minyak dan gas buni tidak semakin besar, dengan memperkuat sektor-sektor non migas seperti sektor Pertanian, sektor Industri non migas, sektor listrik dan Air minum, sektor Perdagangan, sektor Pengangkutan, sektor Uang dan Bank dan yang terakhir

sektor Jasa. Untuk mengambil kebijakan seperti ini diperlukan intervensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Kebijakan-kebijakan yang telah diambil pada masa yang lalu ternyata tidak dapat menahan meningkatnya sumbangan Migas terhadap PDRB harga berlaku, sehingga distribusi pendapatan menurut kelompok masyarakat semakin tidak merata. Oleh karena itu perlu ada perumusan kebijaksanaan secara menyeluruh dengan melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah Propinsi dengan mengikut sertakan DPRD dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, 5 (lima) tahun ke depan, Keuangan Provinsi Riau harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk kebutuhan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan paradigma pengelolaan Otonomi Daerah tidak terpisahkan terhadap perubahan pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini menjadikan pengelolaan keuangan daerah dapat dijalankan secara tertib, transparan, akuntabilitas, konsistensi, komprabilitas, akurat, efisien dan efektif.

Sementara itu, perkiraan penduduk Provinsi Riau pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan peningkatan dari 5.450.862 jiwa menjadi 6.315.787 jiwa. Pertambahan penduduk ini sebagian besar disebabkan terjadinya migrasi dan kelahiran alamiah. Sedangkan menyangkut dengan jumlah angkatan kerja yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan diperkirakan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 3,69%. Angka ini lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja sebesar 4,05%. Tingginya pertambahan angkatan kerja disebabkan pendatang daerah lain yang mencari pekerjaan di Provinsi Riau dan ditambah dari Provinsi Riau sendiri. Oleh karena jumlah angkatan kerja pada tahun 2009 berjumlah 2.507.997 jiwa dan di tahun 2013 diperkirakan akan berjumlah 2.970.398 jiwa atau bertambah sebanyak 462.401 jiwa.

Dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja sebesar 462.401 jiwa selama Tahun 2009 - 2013, maka perlu ada peningkatan kesempatan kerja. Kesempatan kerja diproyeksikan berdasarkan elastisitas kesempatan kerja yaitu perbandingan antara pertambahan kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi pada waktu

yang sama. Jika penambahan kesempatan kerja 4,89% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,56% maka elastisitas kesempatan kerja sebesar 0,5713.

Berdasarkan perhitungan di atas maka kesempatan kerja pada tahun 2009 diperkirakan berjumlah 2.129.934 jiwa dengan perincian sebagai berikut: (1) Sektor Pertanian sebanyak 1.035.174 jiwa, (2) Sektor Industri 136.034 jiwa, (3) Sektor Perdagangan 364.664 jiwa, (4) Sektor Jasa 299.980 jiwa, (5) Sektor Bangunan 108.037 jiwa, dan (6) Sektor lainnya 186.035 jiwa

Dari sektor pertanian, terdapat kesempatan kerja sebanyak 1.035.174 jiwa atau sebesar 48,60%, dimana sebagian besar bekerja pada sub sektor perkebunan, tanaman pangan, kehutanan dan perikanan. Kesempatan kerja pada sektor perdagangan sebanyak 364.665 jiwa atau sebesar 17,12%%, pada sektor jasa sebanyak 299.980 jiwa atau 14,08%, kesempatan kerja pada sektor Industri sebanyak 136.034 jiwa atau 6,39% sedangkan pada sektor bangunan sebanyak 108.037 jiwa atau sebesar 5,07%. Diperkirakan kelima sektor tersebut akan memberikan kesempatan kerja sebesar 91,26%. Pada tahun 2013 jumlah kesempatan kerja di Provinsi Riau akan mengalami peningkatan menjadi 2.646.234 jiwa artinya bertambah sebanyak 516.300 jiwa atau 24,24% dibandingkan dengan tahun 2009. Alokasi kesempatan kerja tahun 2013 adalah:

- (1) Sektor Pertanian sebanyak 1.278.514 jiwa,
- (2) Sektor Industri sebanyak 165.624 jiwa,
- (3) Sektor Perdagangan sebanyak 416.860 jiwa,
- (4) SektorJasa sebanyak 439.200 jiwa,
- (5) Sektor Bangunan sebanyak 131.119 jiwa, dan
- (6) Sektor lainnya sebanyak 514.817 jiwa.

Sasaran kesempatan kerja tahun 2013 pada sektor pertanian berjumlah 1.278.514 jiwa atau 48,31%, sektor jasa 439.200 jiwa atau 15,15%, sektor perdagangan 416.860 jiwa atau 16,60%, dan industri 165.624 jiwa atau 6,26% serta sektor bangunan sebanyak 131,119 jiwa atau 4,95%, artinya sebagian besar kesempatan kerja ada pada sektor pertanian, industri, Perdagangan dan bangunan menurun. Jika pada tahun 2009, 91,26% kesempatan kerja ada di sektor pertanian, Industri, perdagangan, bangunan dan Jasa, maka pada tahun 2013 terjadi sedikit pergeseran kesempatan kerja, dimana peranan sektor pertanian. Perdagangan, industri dan bangunan menurun, sedangkan sektor jasa meningkat. Hal ini menunjukkan terjadinya mobilitas angkatan kerja yang terjadi di salah satu sektor

dapat diisi oleh angkatan kerja dari sektor lain. Gambaran sasaran tersebut dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.9

Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja,
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Riau (Orang/Jiwa)
Tahun 2009-2013

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata Pertum- buan (%)
1. Penduduk	5.450.862	5.653.333	5.864.701	6.085.376	6.315.784	3,17
- Umur 0 – 4	468.904	473.593	478.329	483.113	487.944	0,81
- Umur 5 – 9	559.512	564.547	569.628	574.755	579.938	0,73
- Umur 10 – 14	555.281	565.498	575.903	586.500	597.291	1,51
- Umur 15 Tahun Keatas	3.867.165	4.049.695	4.240.841	4.441.008	4.650.624	4,05
- Angkatan Kerja	2.507.997	2.603.573	2.723.850	2.863.091	2.970.398	3,69
- Pengangguran (%)	17,75	16,50	15,25	14,50	12,25	-1,10
- Kesempatan Kerja	2.129.934	2.234.827	2.363.427	2.500.516	2.646.234	4,89
Pertanian	1.035.174	1.091.281	1.150.428	1.212.781	1.278.514	4,70
2. Pertambangan	43.086	43.599	44.278	45.271	46.132	1,41
3. Industri	136.034	142.836	149.978	157.477	165.350	4,31
4. Listrik	4.848	5.163	5.499	5.856	6.237	5,73
5. Bangunan	108.037	113.395	119.020	124.923	131.119	4,27
6. Perdagangan	364.664	364.664	381.203	398.680	416.680	2,85
7. Pengangkutan	120.820	126.015	131.434	137.085	142.980	3,67
8. Keuangan & Bank	17.291	17.896	18.522	19.171	19.842	2,95
9. Jasa	299.980	329.978	362.975	399.272	439.200	9,28

Keterangan : Tahun 2009 -2013, Angka Proyeksi

Dengan pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 4,89% dan pertumbuhan angkatan kerja 3,69%, maka tingkat pengangguran secara bertahap dapat diturunkan sebesar 5,8%. Pada tahun 2009 jumlah angkatan kerja 2,507.997 jiwa dan jumlah kesempatan kerja 2.129.934 jiwa maka tingkat pengangguran sebesar 17,75% dan diharapkan pada tahun 2013 jumlah kesempatan kerja meningkat menjadi 2.646.234 jiwa dan jumlah angkatan kerja 2.970.398 jiwa, sehingga tingkat pengangguran akan turun menjadi 12,25%.

Pengangguran yang dimaksudkan di sini adalah pengangguran terbuka yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan, dilain pihak ada pengangguran yang tidak kentara, artinya mereka yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu yang biasanya terdapat di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, perkebunan, perikanan. Pengangguran yang tidak kentara ini lebih disebabkan kurangnya keterampilan, pendidikan, pemilikan lahan yang sempit sehingga tidak mampu mencari pekerjaan lain dalam waktu yang terulang.

Sudah barang tentu penyelesaian masalah pengangguran baik mereka yang menganggur karena belum memperoleh pekerjaan, ataupun mereka yang sudah bekerja tetapi kurang dari 35 jam per-minggu. Pengangguran terbuka dapat diatasi dengan memperluas lapangan pekerjaan, tetapi mereka yang menganggur tidak kentara penyelesaiannya tidak dapat secara umum karena menyangkut dengan kondisi orangnya dan masalah yang menyebabkan terjadinya pengangguran tidak kentara tersebut.

Tabel 5.10
Rincian Tingkat Pengangguran Provinsi Riau
Tahun 2009-2013

No	TAHUN	PENGANGGURAN TIDAK KENTARA	PENGANGGURAN TERBUKA	JUMLAH PENGANGGURAN
1	2009	10,05	8,69	18,74
2	2010	9,47	7,70	17,17
3	2011	8,62	7,03	15,65
4	2012	8,37	6,63	15,00
5	2013	6,18	6,13	12,31

Keterangan : Tahun 2009 -2013, Angka Proyeksi

Penyelesaian masalah pengangguran tidak kentara perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya agar mereka yang sudah bekerja tetapi belum efektif, sehingga tidak sampai menjadi pengangguran atau menambah angka pengangguran pada umumnya.

4. Rencana Struktur Ruang Wilayah Tahun 2009-2013

1) Arah struktur ruang wilayah Riau

Dalam struktur ruang wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

Riau yang saat ini dalam proses penyempurnaan, diarahkan untuk pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan (*urban system*), fungsi utama pelayanan perkotaan, hubungan antar pusat permukiman perkotaan, orientasi pergerakan barang dan penumpang, serta kebijakan pokok pengembangan permukiman perkotaan di wilayah Riau sampai akhir kurun RTRWP tahun 2026, dimana dalam RPJMD ini merupakan sasaran target pada penggalan lima tahunan (2009-2013) aktualisasi RPJPD Provinsi Riau dalam mengimplementasikan RTRWP. Arah struktur ruang wilayah Riau divisualisasikan pada gambar 5.1. Sementara itu, guna mendukung aksesibilitas global wilayah Riau ke jaringan perkotaan poros perekonomian dunia dalam rangka menyongsong era pasar bebas, meningkatkan pola kegiatan dan keterkaitan ekonomi wilayah provinsi serta mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanan internal dan eksternal/regional, diarahkan pengembangan 2 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu : Pekanbaru dan Dumai serta 5 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu : Ujung Tanjung, Pasir Pangaraian, Siak Sri Indrapura, Bengkalis – Buruk Bakul dan Rengat – Pematang Reba. Setiap pusat permukiman perkotaan tersebut ditunjang dengan fasilitas pelabuhan laut dan/atau bandar udara sebagai simpul koleksi-distribusi sesuai jenjang fungsi yang direncanakan.

Pekanbaru dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan sebagai ibukota Provinsi dan Kota, Untuk menunjang aksesibilitas global PKN Pekanbaru, dilakukan dengan mengembangkan pelabuhan Pekanbaru dan pelabuhan Tanjung Buton. Pelabuhan Pekanbaru kapasitasnya sudah terbatas dan permasalahan pada alur pelayaran Sungai Siak, maka perlu dialihkan ke Tanjung Buton di pantai Timur Kabupaten Siak. Pelabuhan Tanjung Buton direncanakan sebagai Pelabuhan Nasional (PN), untuk selanjutnya ditingkatkan menjadi Pelabuhan Internasional (PI). Pelabuhan Sungai Duku tetap sebagai pelabuhan penumpang konvensional namun fungsinya ditingkatkan menjadi pelabuhan penumpang internasional.

Menyangkut transportasi udara, untuk menunjang Pekanbaru sebagai PKN diarahkan 1 bandara dengan jenjang fungsi Pusat Penyebaran Sekunder (PPS) yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II, yang terbuka untuk penerbangan internasional dan sekaligus berfungsi khusus sebagai Bandara Militer. Kedepan, sebagai langkah antisipasi lonjakan kegiatan penerbangan dari dan ke Bandara Sultan Syarif Kasim II, perlu studi kelayakan bandara reguler yang terpisah dengan kegiatan bandara militer.

Kota Dumai merupakan pusat kegiatan nasional (PKN) dan untuk menunjang aksesibilitas global PKN Dumai, sejak tahun 2009 diarahkan 1 (satu)

pelabuhan laut yang berfungsi sebagai Pelabuhan Hubungan Internasional (PHI) yaitu Pelabuhan Dumai (Yos Sudarso) dan 1 (satu) bandara yang dipersiapkan sebagai fungsi Pusat Penyebaran Sekunder (PPS) yaitu: Bandara Pinang Kampai yang juga terbuka untuk pelayanan internasional.

Dipromosikannya Kuala Enok sebagai persiapan untuk Pusat Kegiatan Nasional dimasa datang, dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kuala Enok akan menjadi pusat pertumbuhan Riau Bagian Selatan. Keberadaan Kuala Enok sebagai PKN telah ditunjang dengan berbagai sarana penunjang yang memadai berupa pelabuhan internasional dan aksesibilitas berupa jalan yang mampu menghubungkan antara sentra – sentra produksi ke outlet di Kuala Enok. Di samping itu sasaran yang akan dicapai dengan mempromosikan Kuala Enok sebagai PKN diharapkan mampu menyeimbangkan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Potensi pembangunan jalan tol dan atau highway Pekanbaru-Duri-Dumai merupakan akselerasi pembangunan ekonomi pada kawasan andalan Pekanbaru dan kawasan andalan Duri – Dumai sekitar khusus guna memperkuat basis pertumbuhan ekonomi (Kawasan Ekonomi Khusus, dll) di wilayah Utara Riau. Sedangkan potensi pembangunan jalan tol diantara highway Pekanbaru - Siak - Buton merupakan penguatan pengembangan ekonomi (Kawasan Lainnya dan pelabuhan Buton) di Kawasan timur Provinsi Riau.

2) Sasaran/Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Sistem transportasi wilayah dikembangkan secara terpadu inter dan intra moda khususnya dalam rangka menunjang terwujudnya arahan struktur ruang wilayah yang telah direncanakan, mencakup: transportasi darat, sungai dan penyeberangan, serta transportasi laut dan udara.

Sasaran transportasi darat diarahkan terutama melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana jalan bagi keperluan angkutan barang maupun penumpang. Dalam konteks pemenuhan pengangkutan barang produk perekonomian, jaringan prasarana jalan memiliki fleksibilitas dan daya angkut yang besar di samping biaya ekonominya yang relatif murah. Prasarana ini cocok dikembangkan di wilayah Riau yang luas dan di pulau-pulau besarnya, baik untuk angkutan antar kawasan (*internal*) di dalam wilayah maupun ke luar wilayah (*eksternal*). Untuk 5 tahun ke depan, angkutan kereta api (rel) akan dikembangkan di wilayah Riau, sejalan dengan pengembangan Jaringan Perkeretaapian Trans Sumatera (*Integrated Sumatera Railways*) yang memiliki interkoneksi dengan jaringan Pulau Jawa.

Jaringan prasarana jalan terdiri dari ruang arus lalu-lintas dengan berbagai klasifikasi fungsi dan simpul-simpul mengenai terminal penumpang dan atau barang, bandar udara dan pelabuhan udara sedangkan sarana angkutan jalan terdiri dari berbagai moda yang dapat menggunakan kendaraan umum dan pribadi. Dalam Ruang Wilayah Nasional, maupun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM15/1997 tentang Sistem Transportasi Nasional, jaringan prasarana jalan wilayah yang menghubungkan antar perkotaan termasuk ke dalam "Sistem Primer". Pada sistem ini ruas-ruas jalan dikembangkan atas Jalan Arteri Primer (AP), Jalan Kolektor Primer (KP), dan Jalan Lokal Primer (LP).

Dari aspek kewenangan klasifikasi jalan menjadi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Jalan Nasional di Provinsi Riau terdistribusi jadi jalan lintas timur Sumatera, feeder road yang menghubungkan ke jalur lintas barat dan lintas tengah Sumatera.

Pengembangan arus lintasan transportasi di Provinsi Riau, antara lain dibentuk dalam inter moda yang saling berhubungan seperti rencana pembangunan jalan/rel kereta api Rantau Prapat – Dumai – Duri – Pekanbaru – Taluk Kuantan – Muaro, yang merupakan lintasan utama yang digerakkan untuk angkutan orang dan barang, khususnya produksi di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dll.

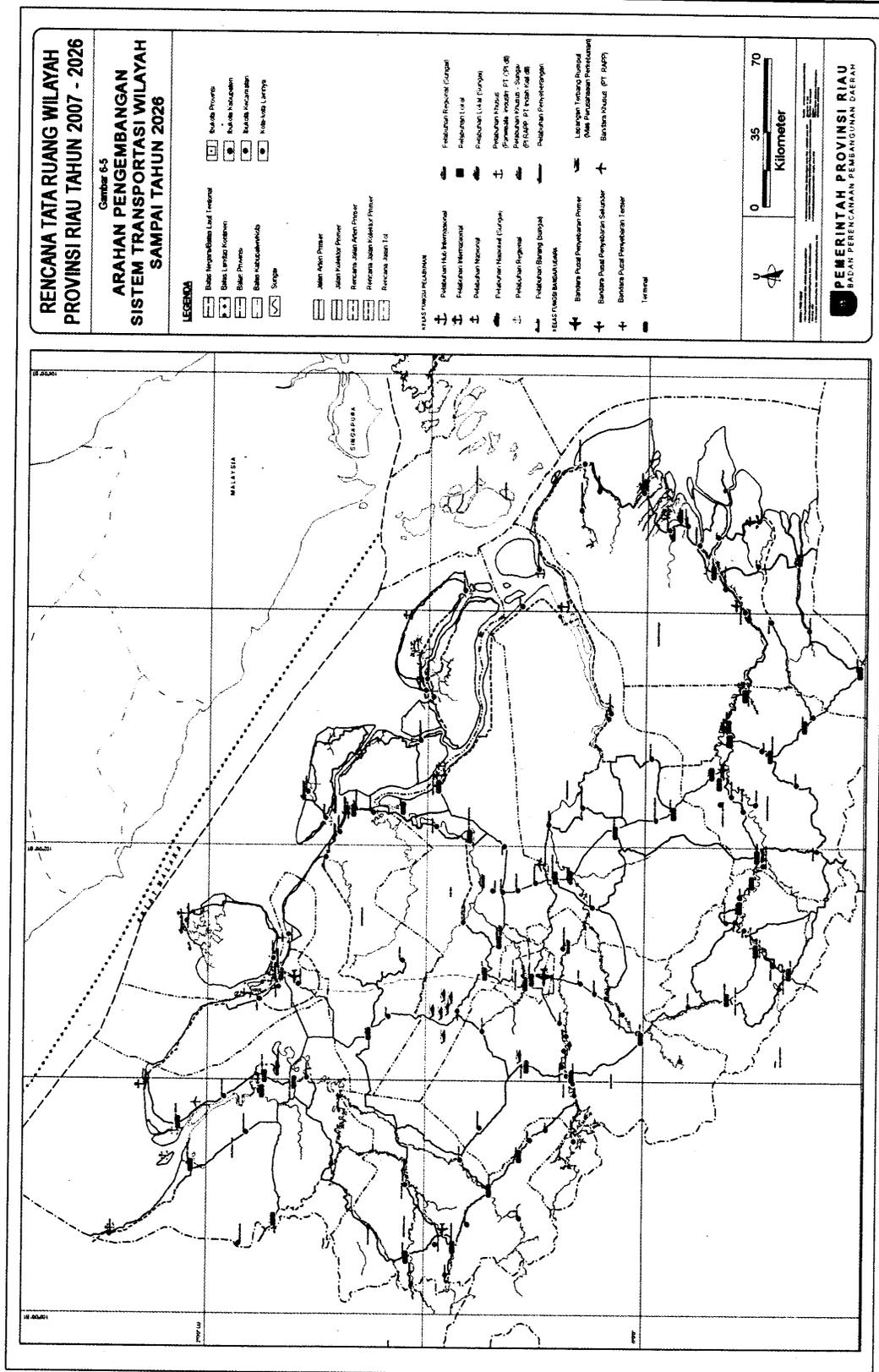
Transportasi darat yang menghubungkan utara dan selatan Provinsi Riau terbentuk akhir lintasan jalan arteri timur Sumatera, disamping kondisi geografis

daerah yang menghubungkan titik simpul pelabuhan udara dan pelabuhan laut yang baru di wilayah pesisir (Selat Malaka) seperti Panipahan, Dumai, Sungai Pakning, Buton, Kuala Enok dll. Sedangkan alur transportasi ke angkutan berat lebih menekankan perlu pengembangan wilayah pada daerah perbatasan dengan penyiapan menuju jalan lintas barat dan lintas tengah Sumatera.

Transportasi sungai dan penyeberangan pada hakekatnya merupakan bagian dari jaringan prasarana jalan yang terputus akibat adanya hambatan berupa sungai dan atau selat, untuk menghubungkan dua wilayah yaitu daratan dan pulau yang berseberangan. Transportasi sungai di wilayah Riau juga banyak digunakan untuk perhubungan antar kecamatan dan atau antar desa yang sifatnya pergerakan lokal, di samping pengembangan pada fasilitas pelabuhan sungai dan penyeberangan bagi kebutuhan perhubungan antar wilayah Kabupaten/ Kota.

Transportasi laut yang akan menjadi sasaran RPJMD 5 (lima) tahun ke depan mengacu kepada kerangka Sistem Transportasi Nasional. Fasilitas pelabuhan laut bagi pelayanan umum berdasarkan fungsinya diklasifikasikan atas, Pelabuhan Hub Internasional (PHI), Pelabuhan Internasional (PI), Pelabuhan Nasional (PN), Pelabuhan Regional (PR) dan Pelabuhan Lokal (PL). Adapun arah pengembangan Sistem Transportasi Wilayah Provinsi Riau dituangkan dalam gambar 5.2.

Gambar 5.2
 Arahan Pengembangan Sistem Transportasi Wilayah Provinsi Riau
 Diaktualisasikan Dalam RPJMD 2009-2013



3) Sasaran/Rencana Sistem Jaringan Energi Listrik

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan perekonomian wilayah, kebutuhan energi listrik di perkotaan dan pedesaan juga akan meningkat sampai dengan akhir RPJMD 2013. Pada saat ini penyediaan energi listrik di wilayah Riau dikelola oleh PT. PLN (Persero) Wilayah III melalui 2 (dua) sistem, yaitu *Pertama*, Sistem Interkoneksi Sumatera Barat - Riau dan *kedua*, Sistem Terpisah menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Sumber energi listrik dari Sistem Interkoneksi Sumatera Barat - Riau, berasal dari pembangkit yaitu:

- (1) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak dengan kapasitas 4 X 43,5 MW, di Sumatera Barat
- (2) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin dengan kapasitas 2 X 100 MW, di Sumatera Barat
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang dengan kapasitas 3 X 38 MW, di Riau.

Pada saat ini telah dibangun saluran transmisi tegangan tinggi 150 KV dari Payakumbuh (Sumatera Barat) ke Koto Panjang (Riau) sepanjang 166 Km, dan telah dibangun Gardu Induk di Bangkinang berkapasitas 1 X 10 MW dan Gardu Induk di Pekanbaru (Teluk Lembu) berkapasitas 2 X 50 MW. Adapun Sistem Terpisah yang umumnya menggunakan PLTD adalah untuk melayani ibukota-ibukota Kabupaten/Kota, ibukota-ibukota Kecamatan dan sejumlah desa di wilayah Riau yang belum terjangkau oleh layanan Sistem Interkoneksi Sumatera Barat - Riau. PLTA meskipun biaya operasionalnya lebih murah, namun memiliki kelemahan berkenaan dengan kontinuitas suplai air baku ke dalam waduk bagi penggerak mesin turbin. Untuk menjamin suplai daya listrik dengan tegangan yang dapat diandalkan di era global yang akan datang, maka perlu diupayakan peningkatan daya listrik melalui penambahan dan diversifikasi sumber-sumber pembangkit baru.

Diversifikasi sumber-sumber pembangkit baru, untuk wilayah Riau dimungkinkan melalui pembangunan PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), dan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air). Pembangunan PLTG bisa dilaksanakan sehubungan dengan dibangunnya Jaringan Transmisi Gas Bumi "TRANS SUMATERA TENGAH" (Asamera Corridor

Block - Duri - Batam) oleh PT Gas Negara, sedangkan PLTU dengan dibangunnya PLTU Peranap oleh PT Bukit Asam menggunakan bahan bakar batu bara. Untuk PLTU Peranap ini pembangunannya direncanakan dalam dua tahap, masing-masing dengan kapasitas 2 X 600 MW.

Adapun pembangunan PLTA, sehubungan dengan ditemukannya potensi energi listrik pada beberapa aliran sungai besar yang ada, yaitu :

- (1) Sungai Indragiri (pada anak sungai Batang Kuantan) di lokasi Lubuk Ambacang, Kec. Kuantan Mudik - Kabupaten Kuantan Singingi dengan potensi daya listrik sebesar 350 MW (hasil studi JICA, 1979).
- (2) Sungai Kampar (pada anak sungai Kampar Kiri) di lokasi Tanjung Balit, Kec. Kampar Kiri - Kabupaten Kampar dengan potensi daya listrik sebesar 178 MW (sumber : Bappeda Prov. Riau).
- (3) Sungai Rokan (pada anak sungai Rokan Kiri) di lokasi Lubuk Bandahara, Kec. Rokan IV Koto - Kab. Rokan Hulu dengan potensi daya listrik sebesar 132 MW (sumber : Bappeda Prov. Riau).
- (4) Sungai Rokan (pada anak sungai Rokan Kanan) di lokasi Sibodak sebelah Barat batas wilayah Kab. Rokan Hulu dengan potensi daya listrik sebesar 56 MW (sumber : Bappeda Prov. Riau).

PLTG memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mengingat cadangan gas yang cukup besar, sekitar 2.509 BSCF untuk *Asamera Corridor Block* saja, yang dapat dieksploitasi selama \pm 40 tahun. Untuk Jaringan Transmisi Gas Bumi "TRANS SUMATERA TENGAH" *Asamera Corridor Block-Duri-Batam* tersebut telah direncanakan 3 (tiga) Station yaitu di Gresik/*Asamera Corridor Block* (Sumatera Selatan), Duri dan Batam (Riau), serta 3 (tiga) Sub Station yaitu di Sekernan (Jambi), Kuala Tungkal (Jambi) dan di Lirik (Riau). Untuk PLTU Peranap yang meskipun produksi listriknya oleh PT Bukit Asam direncanakan akan dijual ke Malaysia, namun tidak tertutup kemungkinan untuk juga disalurkan sebagian daya listriknya ke pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah Riau (utamanya ke kawasan industri) pada sepanjang jalur transmisi listriknya. Untuk PLTA, dari sejumlah potensi yang ada dilihat dari besarnya daya listrik, lokasi dan kedekatannya terhadap permukiman perkotaan (wilayah pelayanan), yang layak dikembangkan adalah lokasi Lubuk Ambacang, Kec. Kuantan Mudik - Kab. Kuantan Singingi dan lokasi Lubuk Bandahara, Kec. Rokan IV Koto - Kab. Rokan Hulu. Kemudian upaya lain adalah membangun Pembangkit Tenaga Listrik antara Malaka dan Pekanbaru (Interconnection). Arah sistem Penyediaan Energi Listrik Wilayah Provinsi Riau dalam dilihat gambar 5.3

4) Sasaran/Rencana Sistem Jaringan Sumber daya Air

Sejalan dengan Arah Struktur Ruang Wilayah Riau, maka penyediaan air bersih perkotaan dengan Sistem Instalasi Pengolahan Air Lengkap (IPAL) jaringan perpipaan pengembangannya diarahkan ke perkotaan-perkotaan jenjang PKN, PKW, dan PKL, serta perkotaan Sub PKL 1 berpenduduk minimal 10.000 jiwa. Untuk perkotaan Sub PKL 1 berpenduduk < 10.000 jiwa, serta perkotaan Sub PKL 2 dan permukiman perdesaan diarahkan menggunakan sistem IPAS jaringan sederhana. Namun demikian, mengingat berbagai kendala teknis maupun non teknis yang mungkin dihadapi dalam pelayanan sistem jaringan perpipaan ini, maka baik di perkotaan maupun perdesaan masih akan ditemui pemenuhan air bersih oleh penduduk secara individu-rumah tangga langsung dari sumber air baku permukaan maupun air tanah dangkal.

Menyangkut sumber air baku bagi penyediaan air bersih perkotaan maupun perdesaan, di wilayah Riau sebenarnya banyak ditemui air baku permukaan pada sungai, anak-anak sungai dan danau yang ada, serta air tanah dangkal maupun dalam di wilayah-wilayah tanah mineral. Namun, di Pantai Timur air bakunya berkualitas rendah akibat pengaruh tanah gambut yang dominan di wilayah tersebut. Hasil penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Balitbang-Depkimpraswil baru berhasil mendesign dan menguji coba Prototipe Instalasi Pengolahan Air Gambut (IPAG) dengan kapasitas 5 liter/menit (0,083 liter/detik), yang bila dioperasikan 24 jam/hari baru bisa melayani 100 jiwa atau \pm 20 KK (asumsi kebutuhan air bersih 85 liter/jiwa/hari).

Memperhatikan kendala tersebut, rencana pembangunan jangka menengah ini dalam penyediaan air bersih di wilayah Pantai Timur yang bertanah gambut ini pengembangannya diarahkan untuk perkotaan berpenduduk 10.000 jiwa atau lebih (eksisting maupun rencana perkotaan baru) serta kawasan-kawasan pelabuhan (eksisting maupun rencana pembangunan baru) maka sistem penyediaan air bersihnya bisa dipilih yang paling sesuai (salah satu atau merupakan gabungan) dari beberapa alternatif sasaran berikut :

- (1) Pembangunan waduk penampung air hujan (*Polder System*) yang direncanakan secara terpadu dengan sistem jaringan pembuangan air hujan (drainase) pada perkotaan yang bersangkutan. Dengan air baku berupa air hujan ini maka untuk produksi air bersih dapat digunakan Sistem IPAL jaringan perpipaan.
- (2) Mengambil air baku dari sungai/anak sungai besar, pada bagian hulu yang sumbernya tidak berasal dari wilayah bertanah gambut (berasal dari tanah mineral). Dengan air baku ini maka pengolahannya juga menggunakan

Sistem IPAL jaringan perpipaan. Diperlukan studi kelayakan dengan mengkaji potensi, produktivitas dan efisiensi.

- (3) Memanfaatkan air gambut yang banyak terdapat di wilayah sekitar sebagai air baku menggunakan Instalasi Pengolahan Air Gambut (IPAG) dengan “Sistem Cluster” jaringan perpipaan.

Sedangkan untuk perkotaan berpenduduk <10.000 jiwa, pengembangan penyediaan air bersihnya diarahkan menggunakan IPAG “Sistem Cluster” jaringan sederhana. Hal ini mengingat jumlah penduduk yang masih berkisar ribuan jiwa sehingga bisa dipenuhi melalui sejumlah IPAG dengan “Sistem Cluster”.

Pemukiman perdesaan yang tersebar secara umum lokasinya, penyediaan air bersihnya diarahkan dengan menggunakan IPAG dengan “Sistem Terpusat” jaringan sederhana (Pada gambar 5-4). Dengan jumlah penduduk yang rata-rata di bawah 1.000 jiwa maka kebutuhan air bersih dapat dipenuhi oleh kurang dari 10 IPAG, sehingga pembangunannya akan lebih efisien bila menggunakan “Sistem Terpusat” dengan satu wilayah pelayanan saja. Arah pengembangan sistem penyediaan air bersih Riau dengan sasaran sebagai berikut:

(1) Air Bersih Perkotaan

- Komposisi pelayanan 80% memakai sambungan rumah dan 20 % memakai hidran umum.
- Kebutuhan air bersih dihitung untuk kebutuhan domestik dan non domestik.
- Standar konsumsi air bersih domestik pada akhir tahun perencanaan adalah :
 - Sambungan Rumah, untuk perkotaan jenjang PKN dan PKW minimal 150 liter/orang/hari, dan untuk perkotaan jenjang PKL dan Sub PKL 1 (> 10.000 jiwa) minimal 100 liter/orang/hari. Sedangkan untuk perkotaan jenjang Sub PKL 2 (<10.000 jiwa) minimal 90 liter/orang/hari.
 - Hidran Umum, minimal 30 liter/orang/hari.
- Perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan BNA (Basic Need Approach) yang meliputi parameter kebutuhan domestik, non domestik, tingkat kehilangan air, kebutuhan maksimum dan kebutuhan puncak.
- Target penduduk terlayani adalah 60 % pada tahun. 2009 dan 80 % pada th. 2026 dari total penduduk perkotaan hasil proyeksi.

(2) Air Bersih Perdesaan

- Pelayanan Air Bersih Pedesaan dengan prioritas pada desa sulit.
- Menggunakan sistem pengolahan sederhana (IPAS atau IPAG) disesuaikan dengan kondisi sumber air baku setempat.
- Untuk mendukung industrialisasi di perdesaan ditargetkan standar konsumsi air bersih pada akhir tahun perencanaan minimal 85 liter/orang/hari.

